

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Volume 11 | Nomor 1 | Juni 2019

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Pelindung : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

Pengarah : Dr. H. nazar Naamy, M.Si

Penanggung jawab : Dr. Winengan, M.Si

Ketua Penyunting : Zaenudin Amrulloh, M.A.

Mitra Bestari : 1. Dr. Nazar Naamy, M.Si (UIN Mataram)
2. Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., P.hd(UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Salviana DS, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)
4. Danang Arif Darmawan, M.Si (Universitas Gadjah Mada)
5. Dr. Slamet Mulyono, M.Si (UIN Sunan Ampel)

Dewan Penyunting : 1. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag
2. Dr. Muhammad Thohri, M.Pd
3. Abdul Najib, M.Si
4. Budiman, M.Sc
5. Novia Suhastini, M.Si

Lay-Outer : Siti Aminah, M.Si

Tata Usaha : Novia Suhastini, M.Si

Alamat

Jurnal Komunitas

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram

Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337

Email: journalkomunitas@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA
Zainal Fadri ~ 1

PENYESUAIAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DI BALAI
BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA (BBRSBD) PROF. DR.
SOEHARSO KOTA SURAKARTA, JAWATENGGAH
Lukman Prasetyo Utomo ~ 19

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP
PEREMPUAN: PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL
Agung Budi Santoso ~ 38

SISTEM PATRIARKI DAN KEKERASAN ATAS PEREMPUAN
Riska Mutiah ~ 57

WISATA BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN
Lalu Hairurrozi ~ 72

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh	
ب : b	ف : f	
ت : t	ق : q	
ث : ts	ك : k	
ج : j	ل : l	
ح : h	م : m	
خ : kh	ن : n	
د : d	و : w	
ذ : dz	هـ : h	
ر : r	ء : ' (schwa)	
ز : z	ي : y	
س : s	Untuk mad dan diftong	
ش : sy	اَ : â	
ص : sh	يُ : û	
ض : dh	وُ : û	
ط : th	أَوْ : au	
ظ : zh	أَيَّ : ai	
ع : ' (schwa)		

**UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS (GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA**

Zainal Fadri

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email:zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id

Abstract:

Vagrant and beggar are one of the social welfare problems currently spreading in urban areas and also began to spread in rural areas. Vagrant and beggar or commonly known as gepeng get daily-life needs by living and earning on the road, even spending a lot of time on the streets. Gepeng is often found in people's lives as beggars and often rises a troublesome because of their actions taken such as picking, grabbing, and robbing, so that proper handling must be carried out immediately. Preventions are carried out in order to create the security and convenience which is a way to provide livelihoods more feasible for them, especially in Yogyakarta. The method used in this paper is qualitative descriptive. Data is taken from using references and previous studies by conducting informal interviews as a approach form gepeng on their activities. The result of this research shows that gepeng has different characteristics from the common street cases, then the handling of gepeng should be taking a different approach. Handling gepeng by the government, the private sector and the community in an integration will certainly have a positive impact on gepeng mitigation, and it has been carried out in Yogyakarta even though it has not overcome the problem completely.

Keywords: Gepeng, Effort, Prevention

A. Pendahuluan

Masalah kemiskinan merupakan problema yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang. Banyak negara-negara yang terkesan tidak dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi negara tersebut, sehingga tidak jarang pula penyelesaian kemiskinan

di suatu negara melibatkan campur tangan dari negara lain bahkan oleh perserikatan yang dibangun antar negara. Seperti di Indonesia, semenjak kemerdekaan seolah-olah Indonesia tidak dapat keluar dari persoalan kemiskinan. Indonesia hanya bagaikan lahan untuk bermain-main mengadu kecerdasan strategi bagi negara-negara maju yang dicurigai sebagai pertahanan kemiskinan hingga saat ini.

Kemiskinan dapat digolongkan dalam dua model sesuai dengan faktor penyebab dari kemiskinan. Pertama kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan secara berkelanjutan. Sementara kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadikan suatu kebiasaan untuk tidak senantiasa melakukan aktualisasi diri, sehingga banyak program dan model pemberdayaan yang dilayangkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Siahaan mengemukakan bahwa kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan karena adanya budaya atau kebiasaan yang telah berlangsung secara kontinu¹. Mereka merasa cukup dan tidak perlu melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan meskipun banyak usaha dari pihak luar yang ikut membantu.

Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan yang memerlukan upaya komprehensif dalam pemberantasannya, karena

¹N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

kemiskinan ini sangat berhubungan erat dengan model kehidupan yang telah menjadi rutinitas bahkan dipercayai sebagai aturan dari nenek moyang. Namun berbeda halnya dengan kemiskinan kultural yang dihadirkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis sering dijumpai dengan singkatan gepeng.

Kemiskinan yang terus melanda gepeng merupakan suatu tradisi yang kurang baik untuk diteruskan pada anak-anak mereka nantinya. Namun, dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga, pengemis dan gelandangan rela melakukan upaya apapun demi mendapatkan bonafit, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan menghadirkan keresahan bagi warga sekitar. Selain dengan cara meminta-minta, banyak gepeng menjalani rutinitas dengan jalan melakukan penipuan, perampokan dan lain sebagainya. Hal-hal yang memungkinkan dapat meresahkan masyarakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh gepeng menjadikan penanganan gepeng merupakan program yang semestinya segera dilaksanakan dengan cepat.

Kemunculan gepeng di tengah-tengah masyarakat tentunya didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kemunculan gepeng merupakan suatu bekal untuk kajian yang kuat atas penanggulangan gepeng, sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat dalam bentuk suatu model pencerahan untuk menanggulangi bertambahnya gepeng dalam jangka panjang.

Dari uraian inilah penulis merasa bahwa permasalahan gepeng merupakan masalah yang harus mendapat penanganan, maka dari itu penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai gepeng dalam pembahasan makalah dengan judul Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis (gepeng) di Yogyakarta. Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan gepeng (gelandangan dan pengemis), diantaranya faktor kemunculan gepeng, dampak gepeng bagi masyarakat, strategi penghapusan gepeng, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan gepeng.

B. Pengertian gelandangan dan pengemis

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belaskasihan dari orang lain². Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak pada masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian, tempat tinggal yang tetap, serta hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belaskasihan orang lain³.

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman tetap⁴. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa, mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian

²Departemen Sosial R.I, 1992

³PP No. 31 Tahun 1980

⁴Marpuji Ali, dkk., *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3*, Surakarta:Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1990.

pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal, seperti pemulung, pengamen dan pengemis.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu *pertama*, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, *kedua*, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan *ketiga*, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana. Wirosardjono juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat⁵.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai gelandangan dan pengemis dapat diambil kesimpulan bahwa, gelandangan dan pengemis merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. Kehidupan gelandangan dan pengemis sering berpindah-pindah sesuai dengan potensi sumber yang mereka harapkan menjadi pokok pencaharian, seperti pasar, terminal maupun stasiun. Gelandangan dan pengemis mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian dari

⁵Ibid.

orang lain, dengan cara meminta-meminta, menipu, maupun melakukan perampokan.

C. Ciri-ciri gelandangan dan pengemis

Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu⁶:

1. Tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain
2. Hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.
3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung bahkan melakukan tindakan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya.
4. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik grobak.
5. Memakai baju yang compang camping, Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.

⁶Ibid.

6. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
7. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
8. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.

D. Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, faktor-faktor munculnya gepeng dapat disebabkan karena:

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

2. Masalah pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu

gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.

3. Masalah keterampilan kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

4. Masalah sosial budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

5. Masalah harga diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan

pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.

6. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap pasrah dan *nerimo* pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan *cash money* yang cukup banyak.

7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan.

Beberapa faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis memperlihatkan kuatnya tradisi dan kebiasaan yang kurang tepat dijadikan sebagai pedoman hidup karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat. Sikap dan kebiasaan inilah yang dinamakan sebagai kultur dalam melakukan sumbangsih atas meningkatnya kemiskinan yang ada di masyarakat.

Kemiskinan kultural yang dijustifikasi sebagai suatu kebenaran akan menyulitkan berbagai pihak dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, terutama penanggulangan masalah gepeng.

E. Model Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Penanggulangan gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab berbagai pihak dan berbagai kalangan. Maraknya gelandangan dan pengemis memperlihatkan penanggulangan gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah maupun swasta merupakan kelompok yang berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan gepeng, sehingga penanganan dari berbagai kalangan dapat disatukan dalam visi besar, yakni pemberantasan gelandangan dan pengemis demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan panti, liponsos, *transit home*, pemukiman, dan transmigrasi.

1. Pendekatan panti

Pada penanganan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap, yang dihuni oleh beberapa keluarga. Pendekatan panti bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain terutama masalah motivasi untuk segera bangkit dari kehidupan menggelandang sehingga diharapkan ada kemauan dari gepeng untuk berubah bersama-sama. Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan menjadikan gepeng menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan

bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja.

2. Liponsos

Liponsos adalah singkatan dari Lingkungan Pondok Sosial. Liponsos merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang dibangun dalam sistem liponsos mirip dengan model pendekatan panti, hanya saja cakupan liponsos lebih luas. Lingkungan liponsos sudah seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis mencoba hidup sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.

3. *Transit home*

Transit home merupakan tempat penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap pada tempat yang disediakan. *Transit home* hanya merupakan peralihan kehidupan dari jalanan atau menggelandang menuju kehidupan dengan tempat tinggal tetap, baik berupa liponsos maupun lingkungan masyarakat secara umum. Pada metode *transit home*, gelandangan dan pengemis memulai mengenali diri sendiri dengan pembekalan sederhana sebagai bentuk kesiapan untuk segera berbaur dengan kehidupan di masyarakat.

4. Pemukiman masyarakat

Pemukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Penempatan gepeng dalam sebuah tata hubungan

masyarakat dilakukan ketika mereka benar-benar siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat, tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan di rumah panti, ataupun bentuk peningkatan kualitas kepercayaan diri pada liponsos.

5. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, khususnya di Yogyakarta dan umumnya di pulau Jawa. Gelandangan dan pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi, yaitu dengan cara mengirimkan para gepeng ke luar daerah bahkan ke luar pulau, sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang. Gepeng yang telah dipindahkan ke daerah-daerah pedesaan atau bahkan dipulangkan ke desa asalnya diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai kontribusi dan motivasi usaha yang dapat dilakukan di desa, sehingga pemikiran untuk tinggal dan bermukim di kota sebagai gelandangan tidak lagi menjadi jalan satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan salah satu metode di atas, atau bahkan dengan menggabungkan beberapa metode. Penggabungan beberapa metode memperlihatkan beberapa tahap untuk menanggulangi gepeng sehingga diharapkan menjadi suatu model komprehensif dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, sehingga tidak meresahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanggulangan Gepeng

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu pihak pemerintah berupa kebijakan-kebijakan daerah, pihak organisasi non pemerintah (LSM) berupa advokasi dan pengangkatan wacana, serta dari pihak masyarakat berupa dukungan penuh sekaligus sebagai pelaku utama dalam menanggulangi gepeng.

a. Pihak pemerintah

Pihak pemerintah di D.I.Yogyakarta telah melakukan upaya penanggulangan gepeng sejak dua tahun terakhir. Pemerintah Yogyakarta bertindak sebagai Pemerintah Daerah dalam penanggulangan gepeng telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Pada Perda tersebut ayat 22, mengatakan bahwa “setiap orang/Lembaga/Badan Hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.”

Dari pernyataan dalam pasal 22 terlihat spirit pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, maka pada tahun 2014 juga dicangangkan oleh pemerintah daerah dengan spirit “2015 Yogyakarta bebas gelandangan dan pengemis.” Selain peraturan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain seperti juga fokus dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, seperti yang pernah diatur pada:

- 1) Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- 2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- 3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.

b. Pihak organisasi non pemerintah (LSM)

Penanggulangan gelandangan dan pengemis tidak luput dari pantauan lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga masyarakat yang lain. Peran LSM dalam penanggulangan gepeng memiliki fungsi sebagai wahana advokasi sehingga persoalan kemiskinan terutama gelandangan dan pengemis menjadi sorotan dari berbagai pihak. Di Yogyakarta terdapat banyak LSM yang memiliki fokus terhadap penanggulan gelandangan dan pengemis yang merupakan faktor pendukung utama dalam aksi menyuarakan kebutuhan masyarakat. Peran LSM yang berpihak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan menjadi landasan utama bagi penanggulangan gepeng dengan pembekalan keterampilan serta sosialisasi agar gepeng siap untuk kembali pada kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya.

c. Pihak masyarakat

Masyarakat merupakan aktor utama dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, karena mereka juga berasal dari kehidupan di masyarakat. Masyarakat memiliki posisi sentral sebagai pengawal program dan kebijakan yang diturunkan serta

sebagai penilai atas keputusan yang diambil dalam penanggulangan gepeng. Kesiadaan masyarakat dalam mendukung program dan membantu melancarkan berjalannya program merupakan suatu langkah pasti dalam penanggulangan gepeng. Lain dari itu, kesiadaan dengan terbuka untuk menerima gepeng kembali pada kehidupan sebagaimana mestinya menjadi langkah besar dalam mengembalikan motivasi diri bagi gelandangan dan pengemis untuk kembali menjalani hidup secara wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis lebih banyak disoroti dari kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Kebiasaan ini merupakan tradisi atau budaya kemiskinan yang menjadikan gepeng sulit untuk berubah sehingga kemiskinan tetap melekat pada diri gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang dapat menghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis diantaranya budaya malas, budaya *cash money*, gaya hidup boros dan ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial.

a. Budaya malas

Budaya malas yang tertanam pada diri gelandangan dan pengemis merupakan penghambat utama dalam penanggulangan gepeng. Para gepeng hanya mengandalkan modal dan usaha yang minimal dengan menginginkan hasil maksimal tanpa mepedulikan kualitas hidup yang dijalani. Budaya malas juga berdampak pada rasa tidak ingin memperbaiki diri dan melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Budaya malas menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah nyaman

dengan lingkungannya yang dikhawatirkan dapat mengganggu ketenteraman hidup bermasyarakat.

b. Budaya *cash money*

Selain budaya malas, budaya *cash money* yang ada pada diri gelandangan dan pengemis menyebabkan mereka tidak pernah ambil pusing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kehidupan sehari-hari hanya dijalani dengan meminta-minta tanpa menghiraukan harga diri dan norma yang ada, sehingga harapan dari para gepeng adalah mengumpulkan sejumlah uang secara instan, sehingga penghasilan tersebut dapat digunakan saat itu juga.

c. Gaya hidup boros

Gelandangan dan pengemis rata-rata hidup dengan gaya konsumtif yang tinggi. Gaya hidup boros terlihat ketika mereka mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih dari cukup, namun tidak tersisa untuk keperluan esok hari sebagai investasi. Kurangnya kesadaran menabung menjadikan gepeng hidup dalam keborosan. Uang yang didapatkan dalam satu hari biasanya akan dihabiskan pada hari itu juga dengan dalih berbagi pada sesama gepeng dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih disayangkan banyak diantara gepeng yang menggunakan uang yang didapatkan dari hasil meminta-meminta hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bukan merupakan suatu hal yang urgent untuk dipenuhi, seperti hiburan, mabok-mabokan, untuk menyewa pelacur dan lain sebagainya.

d. Tidak peduli dengan lingkungan sosial

Ketidakpedulian gelandangan dan pengemis terhadap lingkungan kehidupan sosial merupakan salah satu faktor penghambat penanggulangan gepeng yang paling sulit untuk diselesaikan. Jika gelandangan dan pengemis sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitar, maka dapat dikatakan apapun upaya yang akan dilakukan oleh berbagai pihak tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Kesadaran merupakan kunci dari pemberdayaan, sehingga dengan kesadaran ada keinginan dari dalam diri untuk berubah dan melakukan inovasi perubahan. Jika ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial telah tertanam dalam diri gepeng, satu-satunya cara untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan melakukan tindakan-tindakan tegas yang mungkin akan merugikan pihak gepeng itu sendiri. Tindakan tegas dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Kesimpulan

Penanganan kasus gembel dan pengemis merupakan suatu tantangan bagi pengambil kebijakan karena permasalahan yang dihadapi begitu kompleks. Sebagian gepeng yang ada di Yogyakarta masih memiliki tempat tinggal dan memiliki sanak famili. Alasan keterbatasan ekonomi (bahkan terdapat indikasi berkembangnya budaya malas) sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah dan hidup di jalan. Penanganan gepeng dengan berbagai metode yang telah disampaikan akan sulit terealisasi dikarenakan banyak gepeng yang jika ditelusuri merupakan “kaum berada” di kampung halamannya. Penanganan yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi model penanggulangan gepeng yang

ada di Yogyakarta. Penanganan gepeng akan berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap gembel dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun 1992.

Marpuji Ali, dkk. (1990). *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi* 3, Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980.

N.H.T Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

**PENYESUAIAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DI
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA (BBRSBD) PROF.
DR. SOEHARSO KOTA SURAKARTA, JAWATENGAH**

Lukman PrasetyoUtomo

Email: lukman_prazzt@yahoo.com

Abstrak:

Final Scientific Writing is based on research about Social Adjustment of Disabled People at Social Rehabilitation House of BinaDaksa (BBRSBD) of Prof. Dr. Soeharso Surakarta. The objectives of the research are to obtain the description about: the characteristics of respondents and 5 aspects of social adjustment namely: recognition, participation, social approval, altruism, and conformity. The method used in this research was descriptive research method with quantitative approach; it aimed to describe the Social Adjustment of Disabilities People at Social Rehabilitation House of BinaDaksa (BBRSBD) of Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Data collection techniques used were questionnaires, observations, and documentation studies. The research was conducted on 34 respondents determined by census. The results showed that the characteristics of respondents consisted of 10 women and 24 men among the ages of 17-25 years. The result of research also showed that 5 aspects of social adjustment, namely recognition aspect 94,12% are in high category so that it needs to be maintained, participation aspect 52,94% is in medium category so that it needs to be improved, social approval aspect 50.00% is in high category and 50.00% is in the moderate category so it needs to be improved, altruism aspect 73.53% is in high category so it needs to be maintained, conformity aspect 85,30% is in high category so it needs to be maintained. Based on the results of research, the participation and social approval aspects are in the moderate category, so they need to be improved by taking into account the problems faced and the source system that can be utilized, the writer offers problem solving in the form of "Participation Enhancement Program and Social Approval for Disabled People through Self-help Group (selfhelp group) at Social Rehabilitation House of BinaDaksa (BBRSBD) of Prof. Dr. Soeharso Surakarta. ". This program aims to improve the realization of better social adjustment for people with disabilities.

Keywords: *Social Adjustment, People with Disabilities.*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu adanya peran segenap lapisan masyarakat sebagai pelaku

utama pembangunan, dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sehingga pemerintah berkewajiban memberikan perlakuan yang sama kepada para penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan.

Jumlah Penyandang Disabilitas cenderung mengalami peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan data dari Pusdatin Kementerian Sosial RI tahun 2009 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 1.541.942 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 2.126.785 jiwa. Penyandang Disabilitas Tubuh atau Tunadaksa menempati urutan pertama yaitu 717.312 jiwa atau sekitar 33,74% dari semua penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Menurut data Pusdatin Kementerian Sosial RI tahun 2011 Provinsi Jawa Barat Penyandang Disabilitas Tubuh berjumlah 152.283 jiwa dan Provinsi Jawa Timur Penyandang Disabilitas berjumlah 382.772 jiwa. Provinsi yang mempunyai Penyandang Disabilitas Tubuh lebih tinggi yaitu di Jawa Tengah yaitu sebesar 383.343 jiwa. Sehingga dengan jumlah yang cukup besar ini menjadi tugas bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk peduli terhadap penyandang disabilitas.

Penanganan penyandang disabilitas tubuh merupakan salah satu bentuk pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dari itu dirasakan penting untuk penanganan penyandang disabilitas di Indonesia. Hal tersebut sangat relevan dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sehingga peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan perwujudan atas hak-hak mereka sebagai warga negara, di mana mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sosial seperti: rehabilitasi, pemberian

bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, yang semuanya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat, keluarga serta penyandang disabilitas itu sendiri.

Konsep Penyandang Disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 1 ayat (1), yang menegaskan bahwa penyandang cacat adalah “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.”

Sementara konsep disabilitas menurut World Health Organization (WHO) sebagaimana dikutip Departemen Sosial RI (2008:7) dalam buku Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik, *Disability: alimitation in expected functional due to an underlying impairment; a restriction or lack of ability to perform an activity within the range considered normal for human being. This restriction or lack of ability is often soscially created*. Pengertian tersebut, disability dikatakan sebagai suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal sebagai seorang manusia.

Hal ini sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment yang berhubungan dengan usia dan masyarakat dimana seseorang berada.

Pada dasarnya, Penyandang Disabilitas Tubuh mempunyai kebutuhan sama dengan individu normal akan tetapi karena kekurangan yang ada pada fisiknya membuat mereka menemukan banyak kesulitan. Mereka dituntut untuk mampu menghadapi tantangan atau persaingan hidup sama seperti manusia normal lainnya. Penyandang disabilitas tubuh

tentu saja mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang disebabkan ketidaknormalan tulang dan otot sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Atau lebih jelasnya mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari seperti hambatan fisik, mobilitas, mental psikologis, produktivitas kerja serta hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam berbagai kasus di masyarakat yang ada masih terdapat hambatan untuk para penyandang disabilitas tubuh yang mengalami dalam masalah mengembangkan kemampuan dan penyesuaian sosialnya. Adapun kesulitan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan rendahnya penilaian masyarakat terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tubuh sehingga menyebabkan kurang percaya diri, minder dan merasa tidak berguna (Lauster, 2006).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas salah satunya dengan adanya rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Balai rehabilitasi bagi penyandang disabilitas tersebut difungsikan untuk membantu para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia untuk memperbaiki keberfungsian kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar bisa berfungsi sosial secara wajar kembali sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalamannya. Salah satu unit pelaksana teknis atau tempat rehabilitasi yang dimiliki pemerintah yaitu Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso yang berada di Surakarta. Di balai tersebut, penyandang disabilitas tubuh atau tuna daksa mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Dari pelayanan itu para penyandang disabilitas tubuh bisa mengasah kemampuan, bakat, keterampilan dan mendapatkan pengalaman yang nantinya akan

menjadikan mereka bisa berfungsi sosial kembali apabila sudah kembali ke masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu setiap individu membutuhkan keterampilan sosial untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dengan individu yang lain. Schneirders dalam Hurlock (2002) mengatakan penyesuaian sosial merupakan proses mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat diterima oleh lingkungannya. Individu dianggap memiliki penyesuaian sosial yang baik, jika perilaku individu tersebut mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasi sehingga cocok dengan tempat mereka menggabungkan diri dan diterima sebagai anggota kelompok maupun anggota masyarakat.

Secara umum penyesuaian sosial merupakan sesuatu yang lazim dialami seseorang ketika memasuki suatu lingkungan yang baru tak terkecuali bagi penyandang disabilitas tubuh di BBRSD Prof. Dr. Soeharso ini. Namun, penyesuaian sosial akan menjadi suatu masalah ketika seseorang tidak bisa menyesuaikan diri untuk menjadi bagian dalam lingkungan baru tersebut atau karena ia tidak mampu mempelajari hal-hal yang ada di lingkungan sosialnya tersebut. Jika masalah-masalah penyesuaian sosial tersebut tidak segera diatasi dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak balai tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan, dapat menimbulkan ketidakmampuan klien penyandang disabilitas tubuh dalam melaksanakan kehidupannya secara wajar jika nanti kembali ke masyarakat.

Dalam perkembangannya, Penyandang Disabilitas Tubuh besar kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Hal ini berkaitan erat dengan perlakuan masyarakat

terhadap penyandang disabilitas tubuh. Seperti ejekan dan gangguan dari anak-anak normal yang mengakibatkan timbulnya perasaan negatif pada diri mereka terhadap lingkungan sosialnya, keadaan ini menyebabkan hambatan pergaulan sosial penyandang disabilitas tubuh (SutjihatiSomantri, 2007).

Pentingnya penyesuaian sosial bagi Penyandang Disabilitas Tubuh agar mereka dapat menjalani dengan baik program rehabilitasi yang diberikan oleh pihak balai guna mengasah kemampuan, bakat, keterampilan dan mendapatkan pengalaman yang nantinya akan menjadikan mereka bisa berfungsi sosial kembali apabila sudah kembali ke masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian sosial penyandang disabilitas tubuh merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Penyesuaian Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta Jawa Tengah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah Penyesuaian Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah”. Selanjutnya fokus masalah penelitian ini dirinci pada sub-sub permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah karakteristik responden? (2) Bagaimanakah recognition responden? (3) Bagaimanakah participation responden? (4) Bagaimanakah social approval responden? (5) Bagaimanakah altruisme responden? (6) Bagaimanakah conformity responden?

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kuantitatif

adalah metode penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti permasalahan penyesuaian sosial penyandang disabilitas tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1999: 63).

Metode deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyesuaian sosial penyandang disabilitas tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Teknik analisis data yang digunakandalam penelitian ini adalah teknik analisis data statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah: “statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Dalam penelitian ini hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu menganalisis data secara

rinci dalam bentuk angka atau persentase dari jawaban responden atas pertanyaan penelitian untuk mendapatkan deskripsi tentang masalah penelitian. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik sederhana dengan distribusi frekuensi.

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data melalui kuesioner akan dihitung sehingga mendapatkan hasil yang dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik dari tabel data. Rentang skor dalam penyajian tabel frekuensi diperoleh dengan cara : (1) Terlebih dahulu mencari nilai tertinggi (skor jawaban terbesar dikali banyaknya item) (2) Mencari nilai terendah (skor jawaban terendah dikali banyaknya item) (3) Mencari range (nilai tertinggi dikurangi nilai terendah kemudian dibagi dengan banyaknya kategori).

Dalam pengujian validitas dan realibilitas alat ukur dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur variabel penelitian. Validitas alat ukur yang digunakan adalah validitas muka, yaitu melakukan konsultasi dengan pihak terkait yang ahli dalam masalah validitas alat ukur, dalam hal ini adalah dosen pembimbing penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang penyesuaian sosial penyandang disabilitas tubuh di BBRSD Prof. Dr. Soeharso dilakukan pada responden yang berusia 17-25 tahun. Penyesuaian sosial adalah proses mengubah diri yang dilakukan oleh penyandang disabilitas tubuh yang terdiri aspek recognition (menghormati dan menerima hak-hak orang lain), participation (melibatkan diri dalam berelasi), social approval (minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain), altruisme (memiliki sifat rendah diri dan tidak egois), dan conformity (menghormati dan mentaati nilai-nilai

integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan) di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Dari hasil analisis masalah yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing responden memiliki tingkat penyesuaian sosial yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat melalui kuesioner yang telah diajukan oleh peneliti terhadap 34 responden yang berkaitan dengan penyesuaian sosial responden di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso”, Surakarta. Adapun hasil penelitian dan analisis masalah tentang gambaran penyesuaian sosial penyandang disabilitas tubuh di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah sebagai berikut

1. Karakteristik Responden

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, karakteristik responden menurut usia sebagian besar responden berusia 19-24 tahun atau berada pada masa dewasa dini. Merujuk pendapat Hurlock (1980) masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru, periode ini sangat sulit sebab sebagai orang dewasa, mereka diharapkan mengadakan penyesuaian diri secara mandiri. Hal ini menunjukkan apabila mereka menemui kesulitan yang sukar diatasi, mereka ragu-ragu untuk minta pertolongan dan nasihat orang lain karena enggan kalau dianggap belum dewasa. Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar responden berlatar pendidikan SD. Hal ini menunjukkan untuk tolak ukur pendidikan masyarakat kota, dapat dinilai tingkat pendidikan responden masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir dan bentuk proses penyesuaian sosial responden. Karakteristik responden menurut agama menjelaskan bahwa hampir semua beragama Islam. Hal ini dapat mempermudah dalam melakukan pendekatan agama terhadap responden karena di Kota Surakarta juga sebagian besar beragama Islam.

Pendekatan agama dilakukan agar responden sadar dan dapat memperbaiki perilaku sehingga proses adaptasi akan terbentuk melalui pendekatan agama tersebut.

2. Aspek Recognition Responden

Penyesuaian sosial dalam aspek recognition mengacu pada kecenderungan penyandang disabilitas tubuh atau responden di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam hal menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Menurut Schneiders dalam bukunya "Personal Adjustment and Mental Health" (1964 : 454), ketika kita dapat menghargai dan menghormati hak-hak orang lain maka orang lain akan menghormati dan menghargai hak-hak kita sehingga hubungan sosial antar individu dapat terjalin dengan sehat dan harmonis. Artinya, individu yang kurang menghormati dan menerima hak-hak orang lain akan berdampak terjadinya konflik sosial sehingga hubungan sosial antar individu kurang terjalin dengan sehat dan harmonis pula serta kurang diterimanya individu tersebut dalam lingkungan dimana ia tinggal.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek recognition, sebagian besar responden berada pada kategori tinggi dan hanya 2 responden yang berada pada kategori sedang, dimana mengalami permasalahan terutama dalam hal menyapa orang lain yang hanya dikenal saja. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpahaman responden terhadap penghormatan terhadap hak orang lain yaitu salah satunya sapaan tidak hanya terhadap orang yang dikenal saja melainkan kepada orang lain pun yang tidak dikenal juga. Sebagai akibatnya responden selama menjalani proses rehabilitasi akan membentuk proses penyesuaian sosial yang kurang baik.

3. Aspek Participation responden

Penyesuaian sosial dalam aspek participation mengacu pada kecenderungan penyandang disabilitas tubuh atau responden di BBRSD

Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam hal melibatkan diri dalam berelasi. Menurut Schneiders dalam bukunya "Personal Adjustment and Mental Health" (1964 : 454), individu yang mampu menciptakan relasi yang sehat dengan orang lain, mengembangkan persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, serta menghargai nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya akan membentuk penyesuaian yang baik. Artinya, individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri dari relasi sosial akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Individu ini tidak memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dengan aktivitas dilingkungannya serta tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek participation, sebagian responden berada pada kategori tinggi tetapi sebagian besar sejumlah 18 responden berada pada kategori sedang, dimana mengalami permasalahan terutama dalam hal berbicara hanya dengan orang yang dikenal saja, berkumpul hanya dengan orang yang dikenal saja, kurang senang menonton tv dengan teman yang lain, tidak senang dilibatkan dalam kegiatan apapun. Hal tersebut apabila dibiarkan tidak segera ditangani akan rentan menjadi kategori rendah.

Hal ini terjadi karena kekurangmampuan responden dalam melibatkan diri dalam berelasi dengan kaitan penyesuaian sosial. Komunikasi adalah hal yang sangat diperlukan ketika responden hidup secara kelompok. Dengan berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain, responden dapat memahami karakteristik masing-masing individu, sehingga dengan mudah responden dapat bersosialisasi dengan orang lain. Inilah merupakan salah satu bentuk penyesuaian sosial. Selain itu, dengan komunikasi yang terjalin baik dengan orang lain terutama dengan teman sesama penerima manfaat akan membentuk solidaritas yang kuat

dan rasa saling menghargai sehingga memudahkan responden untuk diterima dalam bergaul dengan orang lain. Hal positif ini seharusnya dijadikan motivasi bagi responden untuk serius dalam menjalani proses rehabilitasi di balai agar ketika responden kembali ke masyarakat nantinya memberikan nilai positif dari masyarakat dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bukan justru sebaliknya dimana responden kurang bisa mengekspresikan dirinya dalam hal berelasi dengan orang lain yang mengakibatkan selama menjalani proses rehabilitasi akan membentuk proses penyesuaian sosial yang kurang baik sehingga berdampak kurang baik pula terhadap dirinya sendiri ketika nanti kembali ke masyarakat.

4. Aspek Social Approval

Penyesuaian Sosial dalam aspek Social Approval mengacu pada kecenderungan penyandang disabilitas tubuh atau responden di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam hal minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Menurut Schneiders dalam bukunya "Personal Adjustment and Mental Health" (1964 : 454), individu yang dapat menunjukkan minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain akan menciptakan kenyamanan dalam berhubungan dengan orang lain sehingga penyesuaian akan terbentuk dengan baik. Artinya, individu yang kurang dapat menunjukkan minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain akan menciptakan kekurangnyamanan terhadap orang lain dalam hal hubungan sosial dan membentuk penyesuaian yang kurang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek social approval, sebanyak 17 responden atau 50% berada pada kategori tinggi dan 50% responden berada pada kategori sedang, dimana mengalami permasalahan terutama dalam hal menasihati orang lain apabila melakukan kesalahan, menghibur

orang lain yang sedang mempunyai masalah, membantu orang lain mencari jalan keluar apabila sedang mempunyai masalah. Hal ini apabila dibiarkan akan memungkinkan berkurangnya kategori tinggi dan bertambahnya menjadi kategori sedang bahkan menjadi kategori rendah.

Hal ini terjadi karena kurang adanya kepekaan responden terhadap kesejahteraan orang lain dalam hal meringankan masalah yang dihadapi orang lain. Selain itu, akan membentuk sifat egois dan akan membuat kurang nyaman dalam hubungan sosial dengan orang lain sehingga membentuk penyesuaian sosial yang kurang baik pula. Sebaliknya apabila responden dapat menunjukkan minat dan simpati terhadap orang lain maka akan membentuk penyesuaian sosial yang baik. Hal ini dapat merupakan bentuk penyesuaian diri dimasyarakat, dimana individu yang peka dengan masalah dan kesulitan orang lain disekelilingnya serta bersedia membantu meringankan masalahnya akan mudah diterima di lingkungannya.

5. Aspek Altruisme Responden

Penyesuaian sosial dalam aspek altruisme mengacu pada kecenderungan penyandang disabilitas tubuh atau responden di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam hal memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Menurut Schneiders dalam bukunya "Personal Adjustment and Mental Health" (1964 : 454), individu yang memiliki sifat rendah diri dan tidak egois akan memiliki kestabilan mental, keadaan emosi yang sehat dan penyesuaian yang baik. Artinya, individu yang kurang memiliki sifat rendah diri dan tidak egois akan memiliki ketidakstabilan mental dan emosi serta penyesuaian yang kurang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek altruisme, sebagian besar responden berada pada kategori tinggi dan ada 9 orang responden berada pada kategori sedang, dimana mengalami permasalahan terutama

dalam hal memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti keinginannya dan lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Hal ini terjadi karena responden kurang memiliki sifat rendah dengan memiliki rasa saling membantu dan mementingkan orang lain merupakan nilai-nilai moral yang aplikasi dari nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari penyesuaian moral yang baik yang apabila diterapkan dimasyarakat secara wajar dan bermanfaat maka akan membawa pada penyesuaian diri yang kuat. Selain itu, akan terhindar dengan konflik sosial, tercipta kenyamanan dalam berhubungan secara sosial dengan orang lain, membuat konsep diri yang positif, dan dapat mudah diterima oleh lingkungannya.

6. Aspek Conformity Responden

Penyesuaian sosial dalam aspek conformity mengacu pada kecenderungan penyandang disabilitas tubuh atau responden di BBRSD Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam hal menghormati dan mentaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi dan kebiasaan. Menurut Schneiders dalam bukunya "Personal Adjustment and Mental Health" (1964 : 454), Dengan adanya kesadaran untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan maka individu akan dapat diterima dengan baik di lingkungannya. Artinya, individu yang kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang ada di lingkungannya akan kurang diterima baik di lingkungannya pula.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek conformity, sebagian besar berada pada kategori tinggi tetapi ada 5 responden yang berada pada kategori sedang, dimana mengalami permasalahan terutama dalam hal mengikuti kegiatan kesenian, kegiatan olahraga, melaksanakan Orientasi Mobilitas, melaksanakan pelatihan ADL, dan tepat waktu mengikuti kegiatan yang ada. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran

beberapa responden tentang menghormati dan menaati peraturan yang ada di lingkungan dimana ia tinggal. Kurang adanya kesadaran responden adalah salah satu indikasi tidak tercapainya penyesuaian sosial. Kurang adanya kesadaran tersebut yang menghambat responden untuk dapat merubah perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Selain itu, kedisiplinan waktu dalam mengikuti kegiatan yang ada dapat menggali dan mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki bagi responden serta merupakan kunci keberhasilan dalam pelayanan rehabilitasi di balai.

D. Kesimpulan

Penyesuaian sosial Penyandang Disabilitas Tubuh dalam lembaga pelayanan rehabilitasi akan sangat berbeda dengan Penyandang Disabilitas Tubuh yang berada dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Banyaknya jumlah penerima manfaat akan membuat penyesuaian sosial Penyandang Disabilitas Tubuh semakin sulit dengan kebutuhan dan permasalahan individu yang berbeda-beda. Individu atau dalam hal ini Penyandang Disabilitas Tubuh harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan aturan yang berlaku dan puluhan bahkan ratusan Penyandang Disabilitas Tubuh yang berstatus penerima manfaat dan hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak mudah.

Melihat hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang penyesuaian sosial penyandang disabilitas tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Balai tersebut memiliki penerima manfaat yang tinggal di balai sejumlah 117 jiwa dan mendapatkan pelayanan berbasis institusi. Peneliti menentukan kriteria dalam memilih sampel yang akan menjadi responden dalam

penelitian yaitu penerima manfaat laki-laki dan perempuan yang berusia 17-25 tahun yang bisa baca tulis.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyesuaian Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah dapat diketahui masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik responden

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden berlatar pendidikan SD. Hal ini menunjukkan untuk tolak ukur pendidikan masyarakat kota, dapat dinilai tingkat pendidikan responden masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir dan bentuk proses penyesuaian sosial responden.

2. Aspek recognition responden

Menurut hasil penelitian, sebagian besar proses penyesuaian sosial aspek recognition responden berada pada katagori tinggi. Proses penyesuaian sosial aspek recognition terbentuk dari responden dalam menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Tetapi beberapa responden masih belum memahami hal tersebut yaitu dalam hal hanya menyapa orang yang dikenal saja sehingga menghambat proses penyesuaian sosial responden.

3. Aspek participation responden

Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyesuaian sosial aspek participation responden berada pada katagori sedang, karena sebagian besar mengalami hambatan terutama dalam hal berbicara dengan orang yang tidak hanya dikenal saja, berkumpul dengan orang yang tidak hanya dikenal saja, lebih senang nonton tv bareng teman yang lain, dan lebih senang dilibatkan dalam kegiatan apapun yang mana hal tersebut adalah bentuk-bentuk dari penyesuaian sosial.

4. Aspek social approval responden

Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyesuaian sosial aspek social approval responden pada katagori sedang. Di mana setengah responden atau 50% mengalami hambatan terutamadalam hal menasihati orang lain apabila melakukan kesalahan, menghiburorang lain yang sedang mempunyai masalah, dan membantu orang lain mencari jalan keluar apabila sedang mempunyai masalah.

5. Aspek altruisme responden

Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyesuaian sosial aspek altruisme responden pada kategori tinggi. Di mana sebagian besar responden sudah berhasil melakukannya. Namun, sebagian responden mengalami hambatan dalam hal tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti keinginannya dan lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri.

6. Aspek comformity responden

Menurut hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyesuaian sosial aspek comformity responden pada kategori tinggi. Di mana sebagian besar responden sudah berhasil melakukannya. Namun, sebagian responden mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan kesenian, mengikuti kegiatan olahraga, melaksanakan Orientasi Mobilitas (OM), melaksanakan pelatihan Activity of Daily Living (ADL), dan tepat waktu mengikuti kegiatan yang ada .

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa muncul beberapa aspek penyesuaian sosial yang masih dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Aspek tersebut adalah participation dan social approval. Aspek tersebut menghasilkan angka prosentase pada kategori yang berada paling rendah diantara tiga aspek penyesuaian sosial lainnya serta masih banyak responden yang berada pada kategori sedang dalam aspek tersebut.

Sehingga penyesuaian sosial aspek ini lebih diprioritaskan dalam pemecahan masalah.

Melihat penyesuaian sosial yang masih dapat ditingkatkan lagi maka peneliti merancang sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan penyesuaian sosial aspek participation dan social approval. Program tersebut berupa diskusi dan sharing yang mengarah pada pemecahan atau solusi masalah yang dihadapi yang nantinya selain akan menambah pengetahuan dari penerima manfaat juga akan menjadi ajang bagi penerima manfaat untuk mengekspresikan diri.

Program yang ditawarkan pada balai adalah Program Peningkatan Participation dan Social Approval Penyandang Disabilitas Tubuh Melalui Kelompok Bantu Diri. Program tersebut menggunakan metode social group work karena metode tersebut sangat cocok digunakan pada suatu kelompok dalam hal ini adalah penerima manfaat yang nantinya dikelompokkan sesuai dengan hambatan dan permasalahan yang dimiliki. Jenis kelompok yang dipakai adalah kelompok bantu diri. Kelompok bantu diri ini dipilih karena selain akan meningkatkan penyesuaian sosial yang dimiliki oleh penerima manfaat juga merupakan sarana untuk menyelesaikan hambatan dan permasalahan bagi penyandang disabilitas tubuh yang merasa senasib sehingga terbentuk partisipasi serta minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk menunjukkan kesolidaritasan dan kemampuan yang dimiliki oleh mereka.

Daftar Pustaka

Hurlock, B. Elizabeth, (2002), Alih Bahasa : Med Meitasari T dan Muslichah Z., Perkembangan Anak Jilid I, Erlangga, Jakarta.

_____.(1980), Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, PT. Erlangga, Jakarta.

Lauster, P. (2006), Tes Kepribadian, Jakarta.

Moh. Nazir, (1999), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Schneiders, A. (1964), Personal Adjustment and Mental Health. New York : Rinehart and Winston.

Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

T. SutjihatiSoemantri, (2007), Psikologi Anak Luar Biasa, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sumber Lain:

Departemen Sosial RI, (2008), Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik, Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Jakarta.

Kementerian Sosial RI (2009), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pusdatin, Jakarta.

, (2011), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pusdatin, Jakarta.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial

Agung Budi Santoso

email: agungbudi9278@gmail.com

Abstract:

National Commission on violence against women (2015) noted that violence against women showed a widespread pattern. The 2016 annual press release (Catahu) released that there were 321,752 of violence cases. The largest type of violence against women was violence in the personal sector. Violence in the form of rape was 72% (2,399 of cases), violence in the form of obscenity was 18% (601 of cases), and sexual abuse was 5% (166 of cases). The majority of personal violence victims (domestic / household) were women. The forms of domestic violence included physical violence, psychological violence, sexual violence and neglect of the household; while the main factor was the lack of communication and disharmony among family members. The impact in the short term was usually like a physical injury, disability, pregnancy, loss of work, and so forth; while the long-term effects were psychological disorders (psychiatric), loss of confidence, fend for oneself, trauma and appearance of fear to depression. The handling of domestic violence is one of the focuses of social workers to play a role in helping / assisting the recovery of victims. The social worker should be able to convince the victims to dare to express their problems, to give a sense of security, and comfort. Social workers in helping victims of domestic violence should have knowledge and alignment to the victims that the slightest violence is a form of crime against humanity. Victims of domestic violence must immediately obtain the protection, security assurance and social assistance. The efforts which can be done by social workers are counseling and family counseling. Those are done as a form of therapy so that victims do not feel the prolonged trauma and they can think calmly.

Keywords: *Domestic Violence, Women, Social Work*

A. Pendahuluan

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang

dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Istilah KDRT² sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³ Dalam konvensi HAM Internasional "*Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR"), the *International Covenant on Civil and Political Rights* ("ICCPR"), dan the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* ("ICESCR") telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

²*Ibid*

³Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahu)⁴ 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola yang meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan korban. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi terjadi meluas dimasyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan negara.⁵ Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang ditimbulkan dikemudian hari.

Catatan kekerasan personal (KDRT/Relasi Personal) Tahun 2016 sebanyak 321.752 kasus. Jenis kekerasan terhadap perempuan paling besar adalah kekerasan di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang paling besar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang menemukan bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis. Artinya terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kekerasan dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan

⁴Catatan Tahunan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati hari hari Perempuan Internasional setiap tanggal 8 Maret.

⁵Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 pada Tanggal 07 Maret 2016.

seksual 5% (166 kasus).⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban-korban kekerasan dalam lingkup personal (domestik/ rumah tangga) adalah perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringse kali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi *focus* pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan Hak-Hak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam penulisan ini akan dibahas lebih mendetail mengenai permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, faktor, dampak dan penanganan dalam perspektif pekerjaan sosial. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) agar dapat diupayakan penanganan secara cepat dan tepat oleh pekerja sosial.

B. Metode Penelitian

Kajian penulisan ini menggunakan studi literatur. Menurut Burhan Bungin “Metode litaratur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial untuk menelusuri data

⁶*Ibid.*

⁷UU No. 23 Tahun 2004 tentangPKDRT.

histories”.⁸ Artinya bahwa studi literatur merupakan sebuah studi yang menekankan pengumpulan data melalui penelusuran/ pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini studi literatur difokuskan pada pengkajian buku-buku sosial yang relevan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian diusahakan adanya analisis dan penafsiran data.⁹ Dengan kata lain metode deskriptif analitis memusatkan perhatian kepada permasalahan penelitian, sehingga hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

C. Bentuk-Bentuk KDRT

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:¹⁰

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak,

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

⁹Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

¹⁰Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.

mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.

2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.
3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku

bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

D. Faktor Penyebab KDRT

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.¹¹

Selain itu Rochmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan *gender*. Hal tersebut acapkali terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman

¹¹Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

keras dan narkoba.¹² Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

E. Toeri KDRT Terhadap Perempuan

1. Definisi Perempuan

Perempuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah lawan laki-laki, wanita.¹³ Dalam istilah ilmu sosial, perempuan dikenal dengan nama feminisme. Feminisme merupakan bagian dari ilmu sosial yang secara naluriah sangat problematik, karena hal ini akan selalu berkontaminasi dengan politik dan ideologi. Feminisme sebagai suatu gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta usaha

¹²*Ibid.*

¹³Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.¹⁴ Namun apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini.¹⁵ Menurut para feminis, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, bukan saja merugikan perempuan, tetapi juga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan potensi yang sama untuk mengakses ke berbagai bidang profesi.¹⁶ Memperjuangkan perbaikan posisi dan kondisi kaum perempuan tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki. Karena persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan, salah satunya, ketidakadilan gender. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil.¹⁷ Oleh karena itu perlu adanya keberpihakan terhadap kaum perempuan, agar posisi dan peran perempuan tidak dipandang sebelah mata, melainkan melihat perempuan memiliki status dan peran yang seimbang dengan laki-laki. Dengan demikian memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bagian dari agenda besar dalam rangka perubahan mewujudkan keadilan gender.

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 154-164.

¹⁵ Riant Nugroho, “Gender Dan Strategi Pengarus-utamaan”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 40.

¹⁶ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), hlm, 280.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 164-165.

2. Teori Dasar Terjadinya Kekerasan

Zastrow & Browker 1984 (dalam Wahab, 2010) menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.¹⁸

Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 6 tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Maksud teori biologis ini bahwa manusia memiliki instink agresif sejak lahir, sehingga perilaku konflik dianggap wajar sebagai bentuk untuk mempertahankan diri dari berbagai tekanan. Perilaku ini dapat terwujud sebagai bentuk kekerasan akibat adanya berbagai tekanan yang berkepanjangan (permasalahan keluarga, ekonomi, dll).

Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Contoh kasus seseorang suami yang sudah bertahun-tahun menganggur dan tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka kecenderungan besar suami tersebut melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya akibat gejala frustrasi yang dialaminya (bahkan ada yang dibunuh). Meskipun

¹⁸Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.

semuanya tidak seperti itu, tetapi dari banyak kasus yang terjadi, efek frustrasi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan.

Ketiga, teori kontrol menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada eks narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman-teman dan keluarganya.

F. Dampak KDRT Terhadap Perempuan

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak

tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Emi Sutrisminah dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/ abortus, persalinan formatur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.¹⁹

G. Perspektif Pekerjaan Sosial

1. Konsep Pekerjaan Sosial

Menurut Edi Suharto, pekerjaan sosial adalah “aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.²⁰ Max Siporin dalam buku karya Dwi Heru Sukoco pekerjaan sosial adalah “suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka”²¹

Definisi dua tokoh tersebut apabila dipahami bahwa pekerjaan sosial pada dasarnya menekankan sebuah aktivitas pertolongan

¹⁹Emi Sutriminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” jurnal online dapat di unduh di <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>

²⁰Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2007), hlm. 1.

²¹Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaannya*, (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos, 2005), hlm. 4.

profesional dengan menggunakan suatu metode dalam rangka meningkatkan dan membantu orang (individu, kelompok, masyarakat) memecahkan masalah mereka serta dapat menciptakan kondisi kondusif dan keberfungsian sosial mereka.

Adapun tujuan pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial di Amerika (*National Association of Social Worker*) sebagai berikut:²²

- a. Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan mereka.
- b. Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidakseimbangan antara individu-individu atau kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan.
- c. Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok, dan masyarakat.

Dengan mengambil kesimpulan diatas, bahwa pekerjaan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan membantu baik individu, kelompok maupun masyarakat. Selain itu fokus utama tujuan pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui metode intervensi yang tepat.

2. Pekerja Sosial: KDRT terhadap perempuan

Terkadang permasalahan sepele dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Itulah indikasi awal penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Berawal dari hal-hal sepele, terkadang dapat menimbulkan permasalahan yang serius. Namun selama ini permasalahan KDRT cenderung dianggap sebagai

²²*Ibid.* hlm. 20.

masalah pribadi dan aib keluarga, sehingga cenderung tertutup dan tidak berani untuk diungkapkan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu benar-benar meyakinkan korban perempuan untuk berani mengungkapkan permasalahan dan memberi rasa aman dan nyaman. Selain itu dalam menolong korban KDRT harus memiliki pengetahuan dan keberpihakan kepada korban bahwa kekerasan sekecil apapun, dengan bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Perspektif itulah yang nantinya menjadi dasar pertolongan bagi korban kekerasan KDRT yang marak terjadi di masyarakat.

Secara garis besar, penanganan KDRT dalam perspektif pekerjaan sosial dapat dilakukan dalam 2 tingkatan, yakni mikro (individu, keluarga, kelompok) dan makro (organisasi dan masyarakat). Keterkaitan kedua tingkatan tersebut merupakan sebuah level intervensi pekerjaan sosial yang paling utama, karena pada dasarnya pekerja sosial adalah jembatan dalam upaya penyelesaian masalah sosial, baik pada tingkat mikro, mezzo, maupun makro. Sehingga pekerja sosial dituntut untuk dapat menguasai metode dan strategi dalam upaya mewujudkan keberfungsian sosial di masyarakat.

Dalam penanganan korban KDRT terhadap perempuan, pekerja sosial sebagai profesi pertolongan harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor (kepolisian, komnas perempuan, kejaksaan, dll). Perspektif pekerjaan sosial, melihat bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali. Berfungsi sosial kembali artinya bahwa korban diharapkan dapat melupakan kejadian yang tidak menyenangkan (melupakan trauma) dan dapat melakukan aktivitas sama halnya sebelum

menjadi korban. Untuk mewujudkan itu, ada 2 hal pokok yang dapat dilakukan pekerja sosial, diantaranya pemberian konseling dan penyuluhan keluarga. Hal ini dilakukan dalam jangka pendek sebagai bentuk terapi agar korban tidak merasakan trauma berkepanjangan dan dapat berfikir dengan tenang.

Adapun kemampuan dasar pekerja sosial dalam upaya penanganan korban KDRT terhadap perempuan diantaranya:

1. Pekerja Sosial harus mampu melakukan assesment klien dengan berbagai metode pengumpulan data.
2. Mampu memahami kondisi klien dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan kejiwaan klien.
3. Mampu mengidentifikasi sistem sumber dan kekuatan klien.
4. Mampu memprioritaskan kebutuhan klien dengan cepat, tepat dan akurat.
5. Mampu membuat rencana-rencana alternatif bagi klien.
6. Mampu melibatkan klien dalam pengambilan keputusan.
7. Mampu mendorong klien untuk berfikir positif dan menghilangkan trauma.

Dengan kemampuan tersebut, diharapkan upaya pemulihan dapat dilakukan secara maksimal baik secara medis maupun sosial. Oleh karena itu dibutuhkan peran pekerja sosial profesional dalam upaya penanganan korban KDRT terhadap perempuan. Karena upaya tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 22 UU No. 23 PKDRT Tahun 2004 yakni : (1). Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal

alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban. (2). Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Tujuan dari pasal tersebut jelas, bahwa pekerja sosial diwajibkan dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT agar korban merasa aman dan tenang dalam menghadapi permasalahannya.

H. Kesimpulan

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penanganan korban KDRT terhadap perempuan, pekerja sosial harus terlibat dalam upaya penanganan terpadu dari berbagai sektor. Perspektif pekerjaan sosial memandang bahwa korban KDRT harus segera mungkin untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan

keamanan serta pendampingan sosial agar korban dapat berfungsi sosial kembali.

Beberapa solusi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, mencegah KDRT antara lain :

1. Membangun kesadaran kepada masyarakat bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum.
3. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan baik di media sosial, elektronik, maupun cetak.
4. Mendorong peranan media massa sebagai media untuk memberikan informasi mengenai pencegahan KDRT.
5. Mendampingi korban dalam penyelesaian persoalan serta menyediakan shelter (rumah aman) yang memiliki konselor terapis sebagai tempat pemulihan trauma.

Daftar Pustaka

- Burhan Bungin, (2008). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Dwi Heru Sukoco, (2007). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pengelolaanya*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos.
- Edi Suharto, (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Mansour Fakhri, (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Riant Nugroho, (2008). "Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rochmat Wahab (2010), *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
- Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 pada Tanggal 07 Maret 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Winarno Surachmad, (1985). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito.
- Zubaedi, (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- World Health Organization, *World Report on Violence and Health 93 (2002)*, dapat diakses melalui www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/

Emi Sutriminah, "*Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*" jurnal online dapat di akses melalui <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>

SISTEM PATRIARKI DAN KEKERASAN ATAS PEREMPUAN

RiskaMutiah

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram

Email: riskamutiah@uinmataram.ac.id

Abstract:

Tatanan patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Tatanan patriarki inilah yang menyebabkan perempuan menjadi subordinasi, termarginalkan, bahkan memperoleh ketidakadilan di dalam masyarakat. Tatanan patriarki mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan yang tidak hanya kita temui pada satu atau dua kelompok masyarakat namun dapat kita temui di seluruh belahan dunia dengan kasus yang paling parah terdapat pada negara-negara dunia ketiga, dimana Indonesia adalah salah satunya. Sampai hari ini catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan setiap 2 jam sekali terdapat 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual dan 60% kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di dalam ranah domestik korban. Bagi Luce Irigaray seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk alat kelamin adalah prinsip pengaturan tatanan simbolik dan melalui hal tersebut kuasa sosial dijalankan. Wacana-wacana universal, apakah itu filsafat, ilmu, atau kesusastraan semuanya diseksualisasikan dalam wacana maskulin. Jelas bagi Irigaray, nilai-nilai pencerahan (renaisans) tidak berlaku bagi perempuan. Karena hal tersebut, posisi sosial perempuan hari ini masih termarginalkan, tidak dianggap sebagai subjek melainkan sebagai objek seksual. Perempuan harus paham mengenai kondisi ini, agar tidak terus-menerus berada di dalam kekuasaan dominasi maskulin, setidaknya perempuan harus berusaha untuk keluar dari konstruk sosial yang telah dilekatkan tersebut. Yang perlu kita sadari bahwa membalikkan tatanan keseimbangan kekuasaan maskulin adalah mustahil jika tidak dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan, karena sistem patriarki telah menancapkan kukunya begitu dalam pada tatanan sosial kita.

Kata kunci: Sistem patriarki, Kekerasan Seksual, Tatanan Sosial.

A. Pendahuluan

Tatanan patriarki menyebabkan perempuan menjadi subordinasi, termarginalkan, bahkan memperoleh ketidakadilan di dalam masyarakat. Posisi maupun peran sosial tidak lepas dari pengaruh identitas gender yang dimiliki seseorang, laki-laki dan perempuan akan mendapat perbedaan peran maupun posisi sosial

yang ada di dalam masyarakat. Perbedaan jenis kelamin dapat kita lihat dalam dua perspektif berbeda yaitu perspektif biologis (sex) dan perspektif sosial (gender) dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara perspektif biologis dan perspektif sosial. Dari perspektif biologis, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan adalah bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan berlaku selamanya, namun jika dilihat dari perspektif sosial, gender dikonstruksi oleh struktur sosial budaya masyarakat, sehingga bisa dipertukarkan sesuai dengan masing-masing budaya yang berarti bahwa konstruksi gender merupakan kesepakatan sosial.

Tatanan patriarki mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan yang tidak hanya kita temui pada satu atau dua kelompok masyarakat namun dapat kita temui di seluruh belahan dunia dengan kasus yang paling parah terdapat pada negara-negara dunia ketiga, dimana Indonesia adalah salah satunya. Sampai hari ini catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan setiap 2 jam sekali terdapat 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Maryana Amiruddin dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa 60% kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di dalam ranah domestik korban, seperti rumah dengan pelaku ayah, paman, kakak, hingga suami korban. Pada 2014 lalu, dari 3.860 kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas, sebanyak 2.183. **kasus atau 56%-nya adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan paksaan berhubungan badan¹.**

¹BBC Indonesia, Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Inferioritas Laki-laki. Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151125_indonesia_kekerasan_seksual_inferioritas (27/11/2015, 14.17 WIB).

Selain itu, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang saat ini harus mendapatkan perhatian khusus yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar. Kekerasan ini disebut dengan istilah *dating violence* atau *black dating*. Kekerasan ini tentunya menjadi fenomena gunung es. Psikolog keluarga Roslina Verauli mengatakan bahwa perilaku kekerasan sering menjadi pemakluman bagi korban, karena yang melakukan adalah orang yang dicintai, sehingga korban *blackdating* tidak melaporkan kejahatan yang terjadi terhadap mereka, tindakan yang termasuk kategori kekerasan dalam berpacaran meliputi pemaksaan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh paling sering adalah paksaan melakukan hubungan seksual dan menyentuh bagian tubuh tertentu yang tidak diinginkan pasangan. "Biasanya paksaan berupa dicium tapi tidak ingin dicium, atau paksaan untuk diraba-raba padahal tidak ingin diraba-raba," ujar Roslina². Kekerasan secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh laki-laki terhadap pasangan perempuannya juga sering terjadi. Hal ini terjadi karena laki-laki merasa superior terhadap perempuan, sementara perempuan juga menganggap bahwa dirinya lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan.

B. Kerangka Teori

Pemikiran-pemikiran Luce Irigaray dipengaruhi oleh banyak tokoh seperti Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, serta Emmanuel Levinas. Ia banyak dipengaruhi oleh Freud dan Lacan namun teori-teori para pemikir tersebut digunakan untuk dikritisi kembali.

²Tempo.co, Korban Kekerasan Pacar seperti Fenomena Gunung Es. Diakses dalam <http://gaya.tempo.co/read/news/2015/01/18/205635613/korban-kekerasan-pacar-seperti-fenomena-gunung-es>(27/11/2015, 13.50WIB).

1. Kritik Terhadap Tatanan Patriarki

Pemikiran utama Irigaray adalah membebaskan yang feminin dari filsafat maskulin. Ia mencatat bahwa segala sesuatu yang kita ketahui tentang perempuan termasuk hasrat seksualnya adalah didapat dari sudut pandang laki-laki. Satu-satunya jenis perempuan yang kita kenal adalah perempuan yang maskulin, perempuan yang sebagaimana dilihat oleh laki-laki. Bagi Irigaray, ada jenis perempuan lain yang juga harus dikenali yakni perempuan feminin, perempuan yang sebagaimana dilihat oleh perempuan itu sendiri. Ia memandang hidup perempuan dalam ranah imajiner sebagai penuh dengan kemungkinan yang sama sekali belum tersentuh oleh perempuan. Wacana maskulin tidak pernah berhasil memahami perempuan atau yang feminin, sebagai sesuatu selain daripada refleksi laki-laki atau yang maskulin³. Irigaray bergerak melampaui pemikiran Lacan tentang tatanan patriarki *phallosentris* dengan pandangannya bahwa ke-yang-lain-an seksualitas perempuan telah direpresi oleh patriarki yang mencoba menteorisasikannya ke dalam parameter maskulin. Definisi patriarki tentang seksualitas menyebabkan perempuan kehilangan sentuhannya terhadap feminitas esensialnya yang terletak di dalam tubuh perempuan, dengan kapasitasnya untuk memperoleh kenikmatan yang berulang dan heterogen⁴.

Irigaray juga mengkritisi teori Freud atas seksualitas perempuan, dimana Freud memandang anak perempuan sebagai defisiensi atau negatifitas, atau sebagai laki-laki kecil tanpa penis.

³Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (terjemahan AquariniPriyatnaPrabasmoro), Yogyakarta: jalasutra, 2010.

⁴Ann Brooks, *Posfeminisme dan Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif* (terjemahan S. Kunto Adi Wibowo), Yogyakarta: Jalasutra, 2011, 118.

Freud menekankan gagasan mengenai perbedaan dengan mengkarakterisasi perempuan sebagai kekurangan. Perempuan adalah refleksi dari laki-laki, sama dengan laki-laki kecuali dalam seksualitasnya. Seksualitas perempuan, karena tidak mencerminkan seksualitas laki-laki adalah suatu kealpaan⁵. Feminin ditentukan sebagai tidak ada apapun selain pelengkap, sisi lain atau sisi negatif dari maskulin. Dalam analisisnya, Irigaray tidak tertarik pada anatomi melainkan pada morfologinya atau dengan kata lain dalam cara hal tersebut direpresentasikan dan dikonseptualisasikan sebagai wacana maskulin. Seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk alat kelamin adalah prinsip pengaturan tatanan simbolik dan melalui hal tersebut kuasa sosial dijalankan (Brooks, 2011). Wacana-wacana universal, apakah itu filsafat, ilmu, atau kesusastraan semuanya diseksualisasikan dalam wacana maskulin. Jelas bagi Irigaray, nilai-nilai pencerahan (renaisans) tidak berlaku bagi perempuan⁶.

Satu-satunya cara mengubah status perempuan secara fundamental adalah melakukan definisi yang menegaskan arti feminin yang sebenarnya atau menciptakan pengertian simbolik perempuan yang kuat. Persoalan utama yang harus diperhatikan adalah mendefinisi dengan cara apapun akan menciptakan kembali feminin yang falik. Feminin yang dapat diekpresikan dalam bentuk suatu konsep adalah membiarkan perempuan untuk terjebak kembali dalam sistem representasi maskulin. Irigaray tidak memiliki banyak waktu untuk membalikkan tatanan segala sesuatu, ia hanya membalikkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perhatiannya tertuju untuk memajukan dan mendorong

⁵Op. cit, hal. 297.

⁶Sarup Madan, *Panduan Pengantar Untuk Memahami Poststrukturalisme dan Postmodernisme* (terjemahan MedhyAginta Hidayat), Yogyakarta: Jalasutra, 2011, 182.

perkembangan bentuk-bentuk tatanan sosial yang spesifik bagi perempuan. Ia percaya bahwa *entre-femmes* merupakan syarat penting bagi penciptaan identitas dan subjektifitas perempuan di arena kultural. Ia menekankan perempuan-sebagai-subjek; ia mengatakan bahwa menempati posisi subjek lebih dari sekadar persoalan posisi pengucapan, tapi juga harus berakar pada praktik sosial. Perempuan harus ikut terlibat dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik⁷.

2. Rumah Bahasa Bagi Perempuan

Salah satu tesis utama Irigaray adalah bahwa bahasa dan sistem representasi yang ada tidak dapat mengekspresikan hasrat perempuan. Laki-laki memiliki kemampuan metabahasa (bahasa yang berbicara tentang bahasa) dan perempuan tidak memilikinya. Ia mengatakan bahwa perempuan tidak bisa mengekspresikan diri melalui bahasa yang dibebankan kepada mereka saat memasuki tatanan simbolik⁸. Perempuan membutuhkan bahasa mereka sendiri. Laki-laki selalu mencari dan membangun rumah bagi mereka sendiri; gua, pondok, kota, teori, konsep, bahasa, bahkan perempuan, maka demikian juga perempuan membutuhkan rumah bahasa. Mereka membutuhkan rumah tinggal yang tidak memenjarakan mereka, sebagai ganti penjara yang tak tampak yang menempatkan mereka sebagai tawanan; tempat tinggal yang memungkinkan mereka tumbuh kembang adalah prasyarat bagi mereka untuk *menjadi*. Irigaray membuat perbedaan yang vital antara bicara *seperti* perempuan dan bicara *sebagai* perempuan, karena bicara sebagai

⁷Ibid.

⁸Ann Brooks, *Posfeminisme dan Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif* (terjemahan S. Kunto Adi Wibowo), Yogyakarta: Jalasutra, 2011, 117.

perempuan menyiratkan tidak hanya pemposisian psikologis tetapi juga sosial⁹.

Sering dikatakan bahwa bicara atau menulis seperti laki-laki menegaskan penguasaan, mengontrol makna, mengklaim kebenaran, objektivitas, atau pengetahuan, sementara bicara sebagai perempuan berarti menolak penguasaan, membuat makna menjadi sulit dipahami atau berubah-ubah, tidak mengontrol, atau menguasai kebenaran, atau pengetahuan. Dengan kata lain, menjadi asertif, mengklaim, menjadi “dogmatis”, yang berarti memiliki tesis, makna, posisi politis, adalah mengambil posisi laki-laki. Irigaray menekankan posisi subjek perempuan, ia mengatakan bahwa menempati posisi subjek lebih dari sekadar persoalan posisi pengucapan, tetapi juga harus berakar pada praktik sosial. Salah satu aspek definisi perempuan sebagai subjek ini adalah bahwa perempuan harus ikut terlibat dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik¹⁰.

C. Pembahasan

Dalam melakukan kritiknya terhadap tatanan patriarki, Irigaray mempunyai pemikiran utama yakni membebaskan yang feminin dari wacana maskulin. Menurutnya, perempuan yang kita ketahui hari ini adalah definisi perempuan yang diciptakan dalam tatanan patriarki yang berarti bahwa perempuan yang sebagaimana dilihat oleh laki-laki. Hal ini sangat merugikan perempuan karena tatanan patriarki merupakan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk alat kelamin adalah prinsip pengaturan tatanan simbolik dan melalui hal tersebut kuasa sosial dijalankan. Karena hal tersebut, posisi sosial perempuan hari ini

⁹Op. cit, hal 188.

¹⁰Op. cit, hal 189.

masih termaginalkan, tidak dianggap sebagai subjek melainkan sebagai objek seksual. Seperti yang diterangkan sebelumnya bahwa kasus kekerasan perempuan yang dilakukan oleh laki-laki saat ini adalah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Gender dikonstruksi oleh struktur sosial budaya masyarakat, sehingga bisa dipertukarkan sesuai dengan masing-masing budaya yang berarti bahwa konstruksi gender merupakan kesepakatan sosial, berikut adalah stereotip gender yang berlaku umum dalam masyarakat:

Feminin	Maskulin
Tidak agresif	Agresif
Tidak independen	Independen
Mudah terpengaruh	Tidak mudah terpengaruh
Submisif	Dominan/berkuasa
Pasif	Aktif
Orientasi domestik	Orientasi publik
Mudah terluka secara emosional	Tidak mudah terluka secara emosional
Bimbang	Tegas
Banyak bicara	Tidak banyak bicara
Lemah lembut	Keras
Sensitif terhadap perasaan orang lain	Kurang sensitif terhadap perasaan orang
Banyak menangis	Jarang menangis
Emosional	Logis
Mengedepankan verbal	

Baik hati	Analistik
Bijaksana	Kejam
Mengasuh anak	Tanpa basa-basi
	Tidak mengasuh anak

(Sumber: Akun Instagram Girltalkgroup)

Dapat kita lihat dari gambar di atas, perbedaan stereotip gender yang melekat pada sosok maskulin dengan feminin sangatlah jauh berbeda. Sifat-sifat yang selama ini dianggap unggul oleh masyarakat semuanya melekat pada sosok maskulin, sementara sifat-sifat yang dianggap lemah dilekatkan pada sosok feminin. Inilah yang dikritik oleh Irigaray dimana Freud memandang anak perempuan sebagai defisiensi atau negatifitas, atau sebagai laki-laki kecil tanpa penis. Freud menekankan gagasan mengenai perbedaan dengan mengkarakterisasi perempuan sebagai kekurangan. Seksualitas perempuan, karena tidak mencerminkan seksualitas laki-laki adalah suatu kealpaan. Feminin ditentukan sebagai tidak ada apapun selain pelengkap, sisi lain atau sisi negatif dari maskulin.

Konsentrasi Irigaray adalah membalikkan tatanan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Perhatiannya tertuju untuk mendorong tatanan sosial yang spesifik bagi perempuan. Disinilah letak pemikirannya yang mengemukakan bahwa sama seperti laki-laki yang membangun rumah, gua, pondok, kota, teori, konsep, bahasa, bahkan perempuan, maka demikian juga perempuan membutuhkan rumah bahasa. Irigaray membuat perbedaan yang vital antara bicara *seperti* perempuan dan bicara *sebagai* perempuan, karena bicara sebagai perempuan menyiratkan tidak hanya pemosisian psikologis tetapi juga sosial.

Bicara seperti perempuan, berarti berbicara sebagai perempuan dalam artian yang telah didefinisikan secara maskulin, sedangkan bicara sebagai perempuan adalah berbicara sebagaimana aslinya perempuan, tanpa terkungkung oleh konstruk sosial atas perempuan yang berlaku selama ini. Perempuan harus paham mengenai kondisi ini, agar tidak terus-menerus berada di dalam kekuasaan dominasi maskulin, setidaknya perempuan harus berusaha untuk keluar dari konstruk sosial yang telah dilekatkan tersebut. Jika perempuan mampu keluar dari definisi tersebut maka dengan mudah akan tercipta tatanan sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dari pada itu, keluar dari pendefinisian tersebut berarti keluar dari kungkungan superioritas laki-laki yang selama ini menjadi payung atas kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Stereotip gender yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan yang berlaku umum di dalam masyarakat sangatlah merekat kuat dalam dasar tatanan sosial. Jika kita telaah dengan apa yang terjadi di masyarakat kita hari ini, pemikiran kedua tokoh di atas adalah relevan bagi penulis, baik Freud yang menganggap perempuan sebagai kealpaan berdasarkan anatomi tubuh sebagaimana yang dikritik oleh Irigaray maupun pemikiran Irigaray sendiri mengenai seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk alat kelamin direpresentasikan ke dalam prinsip pengaturan tatanan simbolik kuasa sosial dijalankan. Hal ini tercermin dari tanya jawab yang diadakan oleh BBC Indonesia antara ShenaRindra seorang korban pelecehan seksual yang menjadi *survivor* dengan *netizen* melalui sosial media *facebook* pada hari anti kekerasan terhadap perempuan

kemarin¹¹, di mana terlihat jelas banyaknya netizen yang menyalahkan korban pelecehan seksual hingga mendapatkan kekerasan secara verbal.

Pada tanya jawab tersebut seorang netizen mengatakan, *"Bagiku itu terjadi bukan karena masalah rok mini, tetapi 'isinya' dan isi dalam hati juga pikiran pelaku"*. Dalam hal ini netizen tersebut memiliki pemikiran yang sama dengan Freud yang memosisikan perempuan sebagai kealpaan yang disebutnya sebagai laki-laki tanpa penis. Ia menganggap bahwa memiliki vagina adalah masalah. Ini adalah sebuah ironi, bagaimana mungkin memiliki alat kelamin selain penis adalah sebuah kesalahan. Pemikiran seperti ini harus kita luruskan, perbedaan anatomi tubuh perempuan dengan laki-laki adalah sama sekali bukan ukuran siapa yang unggul atau siapa yang sempurna sehingga menyebabkan salah satunya dianggap sebagai sebuah kealpaan. Tuhan telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan bentuk yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya ada netizen yang mengatakan *"kalau enggak mau diperkosa... , ya jangan mancing orang buat memperkosa"*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Irigaray bahwa seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk alat kelamin direpresentasikan ke dalam prinsip pengaturan tatanan simbolik kuasa sosial dijalankan. Dari semua tindak kejahatan, kriminal, atau kekerasan yang terjadi, tidak akan pernah kita mendengar bahwa ada pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, namun hal ini berbeda dengan tindak

¹¹Christine Franciska, Bagaimana Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan?. Diakses dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/11/151125_trensosial_kekerasan_perempuan (27/11/2015, 14.05 WIB).

kekerasan seksual bahkan korban adalah pihak yang paling sering disalahkan. Dengan jelas kita dapat membaca pemikiran netizen tersebut di atas bahwa ia membenarkan tindak pelecehan seksual berupa pemerkosaan bahkan yang paling parah adalah menyalahkan korban yang dianggap memancing. Jelas dalam pemahaman kita bahwa tidak ada seorangpun yang dengan sengaja ingin dirinya menjadi korban kekerasan.

Persepsi-persepsi yang menyalahkan korban seperti di atas sebenarnya sangat lazim terdengar di sekitar kita, salah satu alasannya adalah karena perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut menggunakan pakaian yang terbuka, bahkan terkadang sesama perempuan yang mengatakan demikian dan penulis sangat tidak setuju dengan hal ini. Persepsi-persepsi yang seperti ini adalah melanggar kuasa laki-laki atas perempuan, karena persepsi seperti ini bersumber dari pemikiran laki-laki (yang maskulin) yang memang tidak menganggap perempuan (yang feminin) sebagai subjek melainkan dianggap sebagai objek seksual dan untuk membenarkan pemikiran tersebut maka dibuatlah klaim yang demikian yang menyudutkan korban kekerasan seksual.

Selain itu, persepsi yang demikian sebenarnya tidaklah dapat kita jadikan patokan atau sumber satu-satunya sebagai penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan. Data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa 60% kekerasan seksual terjadi di ranah domestik yang pelakunya adalah orang terdekat sang korban. Jika merujuk hal ini maka akar permasalahannya bukan pada cara perempuan berpakaian (hal ini adalah alasan kesekian) melainkan cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Terdapat sebuah kasus beberapa tahun

silam di daerah Barru, Sulawesi Selatan dimana masyarakat digegerkan oleh seorang perempuan yang melahirkan bayi dengan tubuh yang memiliki lafadz Allah dan perempuan tersebut mengaku anak tersebut lahir tanpa ayah dan ia pernah bermimpi didatangi malaikat yang membawa kabar bahwa ia akan diberi bayi oleh Allah (seperti kisah Mariam dan Nabi Isa A.S). Setelah ditelusuri kebenarannya, ternyata perempuan tersebut adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri dan alasan ia melakukan kebohongan mengenai bayinya tersebut adalah karena sang korban merasa harus menutupi aibnya karena ia berasal dari kalangan keluarga yang religius.

D. Penutup

Tatanan patriarki mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan yang tidak hanya kita temui pada satu atau dua kelompok masyarakat namun dapat kita temui di seluruh belahan dunia dimana Indonesia adalah salah satunya. Sampai hari ini cacatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan setiap 2 jam sekali terdapat 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual dan 60% kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di dalam ranah domestik korban. Bagi Luce Irigaray seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk alat kelamin adalah prinsip pengaturan tatanan simbolik dan melalui hal tersebut kuasa sosial dijalankan. Jelas bagi Irigaray, nilai-nilai pencerahan (renaisans) tidak berlaku bagi perempuan. Karena hal tersebut, posisi sosial perempuan hari ini masih termaginkan, tidak dianggap sebagai subjek melainkan sebagai objek seksual. Perhatiannya tertuju untuk mendorong tatanan sosial yang spesifik bagi perempuan dimana ia membuat pembedaan yang vital antara bicara *seperti*

perempuan dan bicara *sebagai* perempuan, karena bicara sebagai perempuan menyiratkan tidak hanya pemposisian psikologis tetapi juga sosial. Perempuan harus paham mengenai kondisi ini, agar tidak terus-menerus berada di dalam kekuasaan dominasi maskulin, setidaknya perempuan harus berusaha untuk keluar dari konstruk sosial yang telah dilekatkan tersebut.

Irigaray berusaha membalikkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan sehingga perempuan yang tersubordinatkan dan dominasi maskulin dalam ruang sosial bisa seimbang. Yang perlu kita sadari bahwa membalikkan tatanan keseimbangan tersebut adalah mustahil jika tidak dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan, karena sistem patriarki telah menancapkan kukunya begitu dalam pada tatanan sosial kita. Jika hal ini terjadi, maka juga akan berimbas secara positif pada kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan karena yang perlu kita perbaiki adalah cara pandang laki-laki terhadap perempuan yang berakar dari sistem patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Brooks, Ann, *Posfeminisme dan Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*(terjemahan S. Kunto Adi Wibowo), Yogyakarta: Jalasutra, 2011
- Sarup, Madan, *Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme* (terjemahan Medhy Aginta Hidayat) Yogyakarta: Jalasutra, 2011

Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro), Yogyakarta: Jalasutra, 2010

BBC Indonesia. 2015. "Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Inferioritas Laki-laki" diakses pada 27/11/2015, 14.17 WIB dari:

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151125_indonesia_kekerasan_seksual_inferioritas

Christine Franciska. 2015. "Bagaimana Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan?" diakses pada 27/11/2015, 14.05 WIB dari:

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/11/151125_trensosial_kekerasan_perempuan

Tempo.co. 2015. "Korban Kekerasan Pacar seperti Fenomena Gunung Es" diakses pada 27/11/2015, 13.50 WIB dari:

<http://gaya.tempo.co/read/news/2015/01/18/205635613/korban-kekerasan-pacar-seperti-fenomena-gunung-es>

WISATA BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN

Lalu Hairurrozi

Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Mataram

Email: lalurozi9@gmail.com

Abstrak:

keterlibatan sektor pariwisata dalam panggung dunia kehidupan manusia diseluruh dunia memiliki dampak besar bagi peradaban dan perubahan dinamika kehidupan dari semua aspek kegiatan sosialisme, wisata yang telah menggarap dan melahap habis semua bidang kehidupan dalam lingkungan manusia yang relative berubah-ubah seiring perputaran waktu dan rotasi bumi, sehingga wisata bukan hanya sebagai ajang rekreasi, menikmati keindahan hanya untuk mencari ketenangan dan kesenangan diri, namun juga bisa sebagai ajang pembelajaran terhadap nilai, norma dan pola kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dalam konteks sosial budayanya. Wisata sebelumnya hanya dikenal sebagai tempat dimana terdapat keindahan-keindahan yang disajikan oleh alam untuk dinikmati para pengunjung, tetapi dalam tulisan ini penulis ingin merubah paradigm itu semua, bahwa berwisata tidak hanya sebagai ajang mencari kesenangan, melainkan juga dapat sebagai ajang penambahan wawasan dan mengenal berbagai budaya diseluruh dunia berdasarkan keterlibatan sektor pariwisata sebagai kemasan baru budaya tanpa merusak ciri dan citra keaslian buday itu sendiri.

Dalam tulisan kali ini ingin mengungkap dan memaparkan tentang manfaat sektor pariwisata dari hasil garapannya dalam dunia kebudayaan sehingga mewujudkan jelmaan baru menjadi “wisata budaya” yang lebih ditonjolkan pada sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi berdasarkan keberadaan wisata budaya Dusun Sade Lombok Tengah melalui sistem hasil kajian kontribusi nyata.

Keywords:Kesejahteraan, Wisata, Budaya, dan Kontribusi

A. Pendahuluan

Manusia pada umumnya menginginkan kehidupan yang layak dan lebih baik dari sebelumnya, yakni dengan melakukan berbagai macam upaya dan usaha dalam mencapai keinginan tersebut. Baik layak secara rohani maupun jasmani, ekonomi ataupun sosial budaya kemasyarakatan, guna terpenuhinya segala bentuk kebutuhan pribadi, keluarga, serta masyarakat, sehingga kesejahteraan sosial dalam hidup dapat diwujudkan. Dalam hal pencapaian sebuah kesejahteraan di lingkungan masyarakat, kali ini penulis mengartikan sebagai tujuan (*goal*) dengan melewati banyak akses yang dapat di pilih, dengan kata lain, kesejahteraan dapat diwujudkan melalui berbagai jalan yang dianggap layak dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, serta diyakini efektif dan efisien sebagai langkah pencapaian yang tepat. Sama halnya dengan tulisan ini, yang ingin mendobrak pemahaman bahwa kesejahteraan masyarakat juga bisa terwujud melalui keberadaan sektor pariwisata sebagai sebuah kontribusi nyata dalam kehidupan masyarakat.

Lumerahnyakata wisata di telinga masyarakat mengartikan sebagai aktivitas rekreasi, jalan-jalan sambil menikmati keindahan alam (*panorama*) dan identik dengan penghamburan uang hanya untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan diri. Itu semua tidak terlepas berdasarkan hasil interpretasi penulis dari buku *Pengantar Pemasaran Pariwisata* yang mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada Bab I pasal 1 point (1) menjelaskan bahwa; Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu

sementara.¹Tentu saja hal ini yang melatarbelakangi kenapa setiap orang membutuhkan rekreasi ke tempat-tempat wisata yang ada. sebagai contohsebut saja salah satunypulau “Lombok”. Pulau ini sering disebut sebagai pulau seribu masjid, pulau dimana masyarakat yang mendominasinya ialah ummat muslim serta terdiri dari banyaknyabangunan-bangunan tempat ibadah (masjid). Namun disamping itu pula, pulau Lombok juga dikenal sebagai pulau surga, pulau yang menyimpan sejuta keindahan dan keaneka-ragaman bahasa (*language*) , sosial (*social*), dan budaya (*culture*) sebagai harta kekayaan yang dimiliki dan dapat dinikmati oleh semua orang.

Wisata yang memiliki berbagai jenis dan kriteria yang ikut mewarnai dunia sektor pariwisata diantaranya; *Pertama* Wisata Alam yang terdiri dari;Wisata Pantai (*Marine tourism*),Wisata Etnik (*Ethnictourism*),Wisata Cagar Alam (*Ecotourism*),Wisata Buru, danWisata Agro. *Kedua* Wisata Sosial-Budaya yang terdiri dari; Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, serta Museum dan fasilitas budaya lainnya² secara umum melengkapi kebutuhan wisatawan diseluruh dunia berdasarkan potensi dari wilayahnya masing-masing. Wilayah Lombok khususnya, dari beberapa jenis dan kriteria wisata tersebut lebih banyak terdapat wisata pantai, cagar alam, etnik, dan sosial-budaya yang dapat memenuhi kebutuhan dari segi pengetahuan serta kepuasan dari setiap individu berdasarkan tingkat minat personal. Sehingga kalau diterawangdari aspek ketersediaan tempat wisata yang dapat dikategorikan cukup banyak di Lombok secara sempit, maka sudah tidak diragukan lagi bahwa ber-wisata sudah menjadi budaya dalam aktivitas

¹ M. Liga Suryadana & Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung; Alfabeta, 2015), hlm. 31.

²*Ibid.*, hlm. 32

kehidupan sehari-hari. Secara singkat dan tidak langsung budaya berwisata bagi masyarakat sudah mulai muncul di tubuh era milenial.

Jika budaya berwisata telah menggarap dan menjadi bagian dalam tubuh masyarakat bahkan menjadi kebutuhan dalam rangkaian proses aktivitas kehidupan, mungkin ini sudah terdengar biasa dan wajar dialami oleh setiap personal, lantas bagaimana dengan budaya yang di anut oleh etnis/masyarakat suku sebagai pegangan dan tuntunan hidup yang diyakini dan bersifat sakral, kini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata atau dapat dikenal dengan sebutan “wisata budaya”. Dalam konteks inilah menjadi dasar pemikiran penulis bahwa sektor pariwisata telah menggarap semua lini kehidupan yang bersifat fleksible dan cocok terhadap semua jenis bidang kehidupan termasuk budaya. Budaya kita ketahui sebagai sebuah hasil cipta cinta, rasa, dan karsa yang menghasilkan bentuk material dan nonmaterial kemudian dipercayai oleh masyarakat dan dijalankan sesuai tatacara serta dilakukan secara turun-temurun, sehingga budaya memang diciptakan oleh manusia sesuai apa yang diterangkan dalam buku *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* bahwa budaya mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia itu. Perkembangan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia.³ Sehingga disamping manusia menjadi pencipta, juga berperan sebagai penganut atau lebih kerennya disebut sebagai *subject* sekaligus *object* kegiatan.

Kegiatan proses dari wisata budaya yang penulis fokuskan pada wilayah Dusun Sade Lombok Tengah sebagai objek dari pembahasan dalam tulisan ini yang akan melihat beberapa kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya, serta akan disajikan dengan

³Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

peluang dan hambatan dalam pencapaian sebagai tangga awal dalam melihat mengukur seberapa jauh langkah kontribusi yang dapat diberikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keberadaan wisata bercirikan budaya.

B. Hambatan dan peluang wisata budaya Sade dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Umumnya usaha dalam meraih suatu tujuan melalui berbagai cara pencapaian, tentu tidak terlepas dari beberapa macam tantangan dan dibarengi oleh peluang pada sisi lainnya, yang kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan dalam mengisi kehidupan lingkungan sosial masyarakat, seolah-olah sudah menjadi kodrat yang harus dihadapi dan dilewati dalam proses perputaran roda kehidupan, terutama bagi keberadaan destinasi wisata budaya Dusun Sade, dan bagaimana cara masyarakat lokal dalam memanfaatkan peluang sumber daya alam sebagai daya tarik kunci secara optimal untuk kesejahteraan serta mampu juga untuk menghadapi berbagai hambatan dalam pencapaian kesejahteraan tersebut antara lain:

1. Peluang

Ketersediaan sumber daya alam serta keunikan suatu wilayah merupakan peluang terbesar dalam pengembangan pariwisata guna pengoptimalisasi pencapaian kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah atau tempat merupakan aset paling berharga bagi masyarakat lokal untuk bisa dimanfaatkan dalam usaha pengembangannya sebagai sebuah daya tarik bagi wisatawan. Wisata dusun Sade salah satunya, dalam usaha mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan sistem pengembangan pariwisata melalui pengelolaan

sumber daya alam seperti budaya fisik dan non fisik, pengelolaan dan pengembangan tersebut bisa dilihat melalui; *Pertama*, artepak-artepek yang masih berdiri kokoh dengan citra kebudayaan fisiknya, serta non fisik seperti sebelumnya menampilkan budaya *Gendang Beleg, Tari Petuk, Oncek*, dan *Presean*. Melihat tingkat peminat wisata akhir-akhir ini yang semakin berkembang dan meningkat di setiap kawasan wisata yang ada di Lombok, maka wisata dusun sade berinisiatif untuk memberikan tampilan baru yang merupakan salah satu tradisi yang telah di anut sejak lama dan kini akan dimunculkan label tradisi budaya lama seperti *nede hujan* ke permukaan publik sektor pariwisata sebagai daya tarik baru bagi wisatawan yang ingin melihat bagaimana pelaksanaan dari setiap budaya, tradisi dan kesenian dari wisata budaya Dusun Sade. *Kedua*, Dari sisi letak geografisnya, wisata budaya Sade cukup strategis karena wilayah Sade sebagai merupakan salah satu bagian dari akses menuju kawasan ekonomi kreatif (KEK) yang ada di Lombok bagian selatan, sehingga memungkinkan untuk memposisikan diri untuk berperan sebagai penopang seluruh aktivitas kegiatan tersebut, dalam artinya bahwa para wisatawan akan melewati kawasan Sade sebelum sampai ke Kuta Mandalika dimana tempat aktivitas KEK sebagai lokasi inti dari persinggahan dan aktivitas *tour*. Maka wisata Sade berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang bergelut di bidang pariwisata dan memiliki mitra *ekstern* maupun *intern* dalam demi keberlangsungan dan eksistensi wisata dusun Sade secara berkesinambungan. *Ketiga*, Wisata budaya Dusun Sade juga memiliki potensi yang sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat lokal, karena dari sisi daya tarik wisata budaya Sade sudah memiliki potensi yang cukup untuk dinikmati oleh para pengunjung antara lain banyak menyediakan hasil

kerajinan tangan masyarakat lokal yang bercirikan budaya khas yang bisa di bawa pulang oleh pengunjung, selain itu juga pengunjung bisa menikmati keindahan kawasan serta bisa mempelajari mengenai budaya Sade bagi wisatawan yang memiliki keinginan untuk menambah wawasan keilmuan mengenai budaya. Sehingga, usaha yang dilakukan dari sistem pariwisata ini adalah mengembangkan wisata budaya Sade sebagai alternatif dengan tujuan untuk usaha peningkatan taraf hidup masyarakat lokal atau tercapainya kesejahteraan hidup.

2. Hambatan

Rancangan sebuah usaha pengembangan pariwisata guna mempersiapkan bekal untuk menghadapi setiap dinamika perubahan dan tantangan zaman, sehingga muncul hasil-hasil prediksi gambaran pada masa yang akan datang, dengan mengacu kepada pertimbangan keadaan sekarang dan masa lalu. Berdasarkan hal itu, maka tersusunlah rencana yang tersusun sistematis guna untuk menghadapi hal-hal yang kemungkinan besar dapat terjadi kapan saja. Sama halnya dengan usaha masyarakat suku sasak Sade dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup melalui keberadaan destinasi di wilayahnya (wisata budaya), dengan bercirikan budaya sebagai pemikat daya tarik pengunjung serta keaslian desain arsitekturnya, kesenian, kerajinan dan kearifan lokal lainnya.

Namun, terkadang dalam upaya mempertahankan berbagai bentuk artepak (budaya fisik) dan budaya non fisik sangat merumitkan, disamping itu dalam konteks wisata budaya Sade, bangunan-bangunan arsitektur budaya yang masih unik dan digunakan memang menjadi salah satu item penarik minat pengunjung di samping adanya budaya non fisik. Tetapi di sisi lain, hal ini juga

menjadi hambatan. Seperti ciri bangunan budaya Sade sebagai contoh dari budaya fisik yang setiap banguannya harus beratapkan alang-alang (*ere*) dan tanaman alang-alang sulit untuk didapatkan, selain itu juga walaupun tanaman ini ada, harganya sangatlah mahal dan cara menganyampun tidaklah mudah, sebab motif unik itulah yang mencirikan khas yang dipelihara hingga bisa ditemukan dan dilihat oleh generasi-generasi di bawahnya, menjadi salah satu hambatan dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan keberadaan budaya secara berkelanjutan. Selanjutnya dari segi budaya non fisiknya, mempertahankan nilai, norma dan etika budaya dalam diri pemuda dan masyarakat suku sasak Sade, agar tetap selalu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri dan mau mempertahankan di segala situasi dan kondisi dinamika perubahan zaman pun ikut serta sebagai tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi.

Kemunculan era digital ini menjadi kekhawatiran masyarakat terutama pada generasi-generasi penerusnya, yang dimana pada zaman tersebut identik dengan kehidupan yang serba instan dan kebarat-baratan (*westernisasi*), sehingga ini yang bisa menyebabkan semakin terkikisnya citra budaya yang ada di Sade khususnya. Maka dari itu, di anggap penting menjadi antisipasi masyarakat terhadap hal-hal semacam itu supaya tidak terjadi, hingga kebudayaan dan hasil peninggalan nenek moyang terdahulu bisa tetap hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan hidup dalam ber-etika serta bertingkahlak dan memberikan manfaat bagi semua orang terutama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat suku sasak Sade melalui alternatif keberadaan sektor pengembangan pariwisata.

C. Kontribusi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diakui bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja secara makro cukup signifikan. Sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam bentuk perluasan peluang kerja, peningkatan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan spasial.⁴ Secara mikro dalam garapan wilayah yang lebih kecil mengenai aspek peluang kerja, pembangunan serta peningkatan pendapatan dalam skala kecil juga dialami oleh masyarakat di kawasan wisata budaya dusun Sade, ini dapat terlihat dari banyaknya perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat Sade semenjak wilayah tersebut diresmikan menjadi salah satu destinasi di Lombok Tengah bagian selatan, baik perubahan itu dilihat dari segi pendapatan ekonomi, kehidupan sosial, cara berinteraksi, peluang kerja dan lain sebagainya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sebagai efek dari adanya sistem lembaga kepariwisataan yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku sasak Sade.

Perubahan-perubahan inilah yang dikategorikan sebagai sebuah kontribusi atau dampak yang dihasilkan oleh keberadaan sektor pariwisata, yang secara langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat lokal sebagai aktivitas dalam usaha memenuhi segala bentuk kebutuhan dan hasil upaya dalam meraih kesejahteraan hidup yang tidak hanya terpaku dengan ekonomi semata, sebab kesejahteraan tidak hanya menggarap bidang perekonomian atau material saja, melainkan spiritual dan sosial juga seperti apa yang

⁴ Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang & Tantangan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 3-4

tertera dalam buku *Pekerja Sosial & Kesejahteraan sosial* yang mengutip Undang-undang no 11 tahun 2009, pasal 1 ayat 1 bahwa, “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”⁵. Oleh karena itu, dalam beberapa kontribusi wisata budaya dibawah ini akan diulas secara umum terkait pemberian wisata budaya terhadap kesejahteraan masyarakatnya, antara lain:

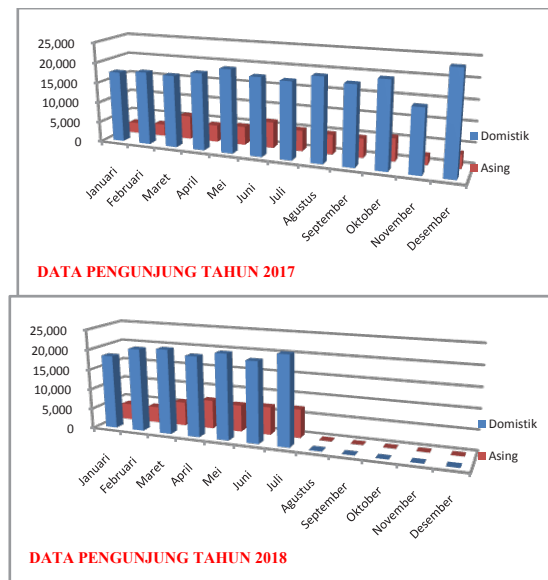
1. Peningkatan Ekonomi dan SDM

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesejahteraan tidak hanya mencakup satu bidang saja, namun kesejahteraan seringkali diukur dari seberapa jauh perkembangan dan pendapatan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setelah adanya sebuah lembaga (pariwisata) sebagai sebuah sistem baru di lingkungan masyarakat, walaupun secara jelas bahwa hal ini juga tidak bisa dinafikan, karena material juga termasuk salah satu kategori dalam kesejahteraan. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas masyarakat suku sasak Sade yang kalau di garap dari rentetan sejarah kehidupan sebelumnya, secara keseluruhan masyarakatnya hanya berprofesi sebagai petani dan mengaisrizki melalui bercocok tanam, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan fisik hanya bertumpu pada apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Namun dengan adanya wisata, masyarakat suku sasak Sade kini dapat memanfaatkan sektor pariwisata sebagai ajang untuk memperkenalkan produk-produk khas seperti kain tenun dan berbagai macam aksesoris bercirikan budayasade dengan mengembangkan dan memberikan jasa penjualan

⁵Miftachul Huda, *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73.

seperti adanya tempat-tempat penjualan yang secara kepemilikan dimiliki oleh masyarakat suku sasak Sade disamping masyarakat Sade juga tetap melakukan aktivitas bercocok tanam sebagai pekerjaan yang paling diutamakan, dan sebagai tambahan penghasilan, mereka juga dapat menghasilkan pendapatan melalui penawaran produk kepada setiap pengunjung yang datang, sehingga bisa dikatakan bahwa, pendapatan masyarakat Sade sebagiannya bertumpu pada jumlah wisatawan yang datang berkunjung.

Wisatawan memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat lokal, sebab umumnya sebuah destinasi tidak bisa terlepas dari peran dan keberadaan pengunjung, terlebih lagi para pengunjung bisa menjadi konsumen utama keindahan dan kemewahan alam serta produk yang dihasilkan, juga para pengunjung bisa memposisikan diri sebagai donatur dalam mempercepat pengaplikasian dari upaya rencana yang ingin dicapai oleh lembaga wisata. Maka tingkat jumlah pengunjung juga memiliki peran sangat penting dalam suatu pencapaian perbaikan taraf hidup masyarakat dalam sektor pariwisata dan memiliki pengaruh dan dampak besar yang bisa dibuktikan dari hasil rekapitulasi data pengunjung yang setiap tahun memiliki perubahan sebagai komparasi tingkat kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

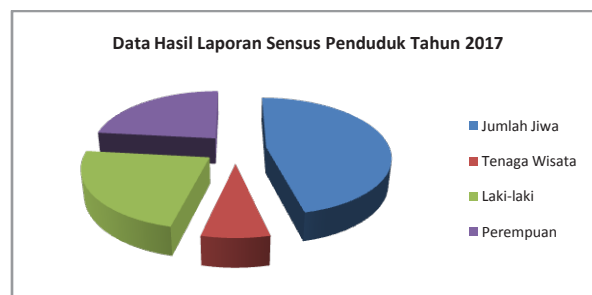


Grafik 1. Data Rekapitulasi Pengunjung Wisata Dusun Sade.

Hukum ekonomi akan terdengar lugas jika mengatakan “semakin banyak pengunjung yang datang, maka semakin besar kemungkinan pendapatan yang akan dihasilkan” dalam konteks konsep rekreasi dari sebuah destinasi wisata yang menyediakan barang tawaran dan jualan. Dari sisi lain, bisa juga dianalisis dari realita gejala alam yang tidak normal berupa gempa bumi pada bulan Agustus 2018 yang menimpa pulau lombok, ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan secara drastis terhadap jumlah pengunjung, dan karena keadaan itu, masyarakat suku sasak Sade mengalami masa krisis dalam perekonomian seperti grafik di atas sebagai indikator dari sejauh mana tingkat pencapaian kesejahteraan telah dialami masyarakat. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa normalnya peningkatan pendapatan masyarakat lokal dengan keberadaan wisata tersebut sangat dirasakan dari sisi perekonomiannya.

Selain dari segi ekonomi, pengembangan sumber daya manusia juga sangat terlihat di dusun Sade, terbukti pada keratifitas yang muncul, mulai dari hasil-hasil kerajinan baru masyarakat yang juga bisa ditawarkan kepada para pengunjung wisata, juga terbukanya peluang kerja bagi masyarakat lokal yang bisa dirasakan walaupun hanya sebagai pemberian jasa dalam bentuk sebagai seorang pemandu (*guide*) wisata. Maka peluang kerja-pun terbuka disebabkan karena keberadaan wisata ini. destinasi wisata budaya dusun Sade lebih mengedepankan masyarakat lokal sebagai pelaku inti dalam segala bentuk aktivitas dan pengelolaannya, walaupun bisa dikatakan secara persentase masih jauh tidak sebanding antara jumlah penduduk dengan jumlah tenaga wisata yang termasuk dalam struktur kelembagaan wisata di luar usaha otonom yang didirikan oleh masyarakat seperti tempat penjualan produk hasil kerajinan tangan. Namun dalam konteks sekarang ini lebih ditonjolkan kearah SDM-nya, artinya apa, tidak peduli jika seluruh jumlah penduduk Sade 46%, sedangkan hanya 7% dari masyarakat lokal yang menjadi tenaga wisata berdasarkan data pesentase data sensus tahun 2017 dan temuan dilapangan. Sehingga kalau kita lihat dari segi persentase atau jumlah dalam bentuk hitungan matematika, maka kita akan menganggap bahwa kesejahteraan belum bisa terwujud dan dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera, artinya wisata Sade belum bisa meraih itu semua. Namun, tingkat kesejahteraan tidak di hitung menggunakan rumus matematika (tambah, bagi dan kurang) yang hanya melihat kesejahteraan sebagai setengan atau 50% dari jumlah keseluruhan angka, tetapi kesejahteraan dilihat dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia penghuni wilayah asli sebagai pengelola dan pelaku aktif dalam segala aktifitas

walaupun jumlahnya masih minim dan sedikit yang masuk di kelembagaan pengurus wisata, namun sama-sama memiliki tujuan untuk mendatangkan dan menawarkan jasa pemandu dengan dilengkapi berbagai produk yang bisa dibeli oleh pengunjung sebagai oleh-oleh atau sebagai testimony atas pernahnya berkunjung ke Dusun Sade. Lebih jelasnya kesejahteraan dalam konteks ini adalah melihat wisata budaya Sade telah mampu memberikan kegiatan baru dalam mencari nafkah dan juga bisa mengabdikan diri di kawasan mereka sendiri tanpa harus mencari pekerjaan di luar sana, inilah yang membuktikan bahwa terbukanya dan pemanfaatan potensi masyarakat lokal sebagai pelaku wisata secara langsung.



Grafik 2. Persentase Pemberdayaan SDM

Mulai dari pengelola wisata sampai pada pelayanan dan pelaksanaan wisata, dilaksanakan oleh masyarakat asli suku sasak Sade sendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku sasak Sade dari segi ekonomi bisa dinikmati dan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah pengunjung wisatawan, dan juga kalau dari segi sumber daya manusianya, masyarakat lokal dilibatkan secara langsung dalam segala bentuk pengolahan dan pelayanan proses wisata dusun Sade, serta masyarakatnya dituntut untuk bisa berkreasi dalam segala hal, dan masyarakat lokal mengalami perkembangan

dalam pelayanan, baik dari sisi etika, adab dan sopan santun serta mampu berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa asing sebagai bentuk pertama dari kontribusi wisata budaya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Terjalannya Hubungan Sosial

Kontribusi selanjutnya yang dihasilkan dari keberadaan wisata budaya ini untuk kesejahteraan dengan kategori selain ekonomi ialah menunjukkan kepada sisi sosialisme, yaitu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan luput dari bantuan orang lain, manusia pada hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana Allah S.W.T berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an. Di antaranya:

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.(Q.S. Yasin, 36)

Berpasang-pasangan tidak hanya diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, tetapi berpasang-pasangan juga diartikan sebagai hubungan yang terjalin antar sesama makhluk yang saling membutuhkan antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, menjadi salah satu kontribusi yang penting juga diberikan oleh wisata budaya Sade bagi masyarakat lokalnya yakni bisa mengembangkan jaringan dan hubungan baik dengan para wisatawan, tentu secara *out put* yang dihasilkan adalah proses interaksi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula, serta melalui hubungan yang baik inilah terbentuk hubungan sosiologis serta tali silaturahmi akan tetap terjaga. Dalam hal kesejahteraan,

menciptakan hubungan yang baik antara sesama juga dapat memberikan jalan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W dalam sebuah hadits yang berbunyi :

“Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi”(mutafaqun ‘alaih)⁶

Menyambung tali silaturahmi dapat melapangkan dan mempermudah pendapatan rizki dari segi ekonomi, dengan kata lain material akan terus berdatangan selama jalinan hubungan sosial yang baik tetap terjaga, lebih-lebih kalau hubungan itu terjalin atas dasar keberadaan wisata budaya yang sedang berkembang pesat. Kelebihan yang dihasilkan dari hubungan silaturahmi ini sesuai dengan hadits di atas yakni, proses pencapaian kesejahteraan dari bidang ekonomi telah dijanjikan, semakin sering dan semakin banyak orang yang menjalin hubungan dengan mengunjungi secara langsung ke tempat wisata budaya Sade ini, maka tidak hanya keberkahan dunia yang didapatkan, tetapi juga mendapatkan keberkahan umur sebagai bentuk kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat langsung karena setiap pengunjung adalah penyambung silaturahmi sebagai sesama makhluk hidup dan sosial.

3. Dapat Saling Mengenal (Budaya)

Menurut McKercher dan duCros dalam Tunggul Prasodjo, bahwa adanya perkembangan pariwisata budaya berkaitan erat

⁶Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimîn, *Betapa Penting Menyambung Silaturahmi*, <https://almanhaj.or.id/2658-betapa-penting-menyam-bung-silaturahmi.html>, diambil tanggal 2 April 2019, pukul 06.40 wita.

dengan adanya apresiasi dari masyarakat untuk secara terus-menerus menjaga dan memelihara aset budaya atau pusaka budaya mereka yang dalam perkembangannya saat ini semakin dirasakan berkurang.⁷ Juga dalam referensi yang sama Goeldner mengemukakan bahwa pariwisata budaya mencakup semua aspek dalam perjalanan untuk saling mempelajari gaya hidup maupun pemikiran. Sehingga keberadaan wisata budaya Dusun Sade, merupakan usaha mempertahankan, menjaga dan memelihara aset budaya yang sudah ditinggalkan untuk bisa selalu hidup dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Disamping itu juga, kehadiran wisata budaya Dusun Sade ini merupakan sebagai ajang untuk saling mempelajari budaya-budaya, gaya hidup dan pemikiran masyarakat lokal sebagai pelaku, dan pengunjung sebagai pembelajar, sehingga kontribusi berikutnya ialah dari segi spiritual keberlangsungan budaya yang ada dengan memberikan dan bertukar pengetahuan terhadap budaya di seluruh dunia.

Indonesia khususnya merupakan negara dengan begitu banyak ragam kebudayaan dan kekayaan sumber daya alamnya sehingga memungkinkan untuk bisa saling bertukar dan memperkenalkan budaya masing-masing dalam sebuah pertemuan secara langsung. Wisata budaya Sade yang kini juga menjadi salah satu destinasi wisata dalam bentuk budaya sebagai ajang untuk saling mengenal antar budaya. Sebagaimana keberagaman merupakan sebuah rahmat untuk bisa saling mengenal, seperti salah satu firman Allah S.W.T di bawah ini:

⁷Tunggul Prasodjo, *Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Vol, 3, No, 1, 2017, hlm. 9

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat, 13)

keberagaman dapat di sebut sebagai sebuah keniscayaan yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, namun esensi dari itu semua adalah dapat saling mengenal antara yang satu dengan lainnya, sehingga dalam aplikasi wisata juga bisa bermanfaat untuk penambahan wawasan dan dapat berbagi pengalaman. Seperti halnya wisata budaya dusun Sade yang memiliki kontribusi bagi masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dapat dilihat dari pengenalan keberagaman pada aktivitas wisata antara pengunjung dan masyarakat lokal, yakni selain pengunjung mengetahui budaya yang hidup di Sade, juga masyarakat lokal mendapatkan pengetahuan dan pengalaman budaya yang hidup di daerah pengunjung. Sehingga dengan kata lain, tidak hanya masyarakat suku sasak Sade yang mengenal para pengunjung, tetapi wisata budaya Sade terkenal dimana-mana, dan inilah yang menjadi modal perkembangan wisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal seterusnya.

D. Kesimpulan

Mengungkap fenomena kehidupan masyarakat pada era milenial yang selalu berubah-ubah seiring perkembangan zaman dan kemajuan sistem peradaban dunia yang layaknya mengikat manusia untuk terus ikut sebagai pemeran yang bersifat dinamis dan menuntut untuk terus

bergerak maju. Dunia pariwisata telah melahap habis seluruh bidang kehidupan masyarakat, seolah-olah menjadi bagian penting dalam kehidupan dan aktifitas sehari-hari, sehingga budaya-pun terlahir dengan kemasan baru tanpa merusak sedikitpun nilai citra dari kebudayaan asli dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dapat dihasilkan melalui keberadaan wisata yang bercirikan budaya sebagai salah satu destinasi dan pengembangan serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagai prioritas atas pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Dari hasil pembahasan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa ada tiga aspek penting di dalamnya, antara lain: *Pertama* Budaya merupakan kunci utama yang sudah final layaknya manusia, *Kedua* Wisata sebagai alternatif pencapaian layaknya kendaraan, dan *Ketiga* Kesejahteraan merupakan tujuan pemberhentian, sehingga dari tiga bagian ini harus saling melengkapi guna mempercepat pencapaian.

Namun sebelum itu, dalam pencapaian yang disebut dalam konteks ini sebagai sebuah kontribusi, tentu belum bisa diketahui sebelum mengetahui peluang serta hambatannya. Sehingga dalam pencapaian kesejahteraan melalui keberadaan wisata budaya Sade juga memiliki peluang dan hambatan, antara lain: *Pertama*, Peluang yang dimiliki oleh wisata budaya Sade ini ialah letak geografis yang cukup strategis untuk pengembangan wisata, juga mendukung untuk memunculkan budaya lama sebagai daya tarik baru bagi wisatawan, dan memiliki potensi besar untuk kehidupan masyarakatnya. *Kedua*, Hambatan yang dihadapi oleh wisata budaya Sade ini ialah langkanya bahan arsitektur yang digunakan sebagai pemertahan ciri khas budaya seperti ilalang yang digunakan sebagai atap bangunan, jugaantisipasi atas kekhawatiran pengaruh budaya *Western* yang sewaktu-waktu dapat merasuki pola pikir dan tingkah laku dari generasi-generasi

penerus, yang akan menyebabkan hilangnya rasa cinta terhadap budaya sendiri yang telah di wariskan oleh leluhurnya karena terlalu terobsesi dan terlena dengan gaya hidup dunia modern.

Sedangkan kontribusi wisata budaya Sade untuk kesejahteraan masyarakat yakni dapat dilihat dari transformasi propesi mulai dari petani sampai kepada pengelola dan pemeran wisata yang dapat merasakan melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam seluruh rangkaian aktifitas wisata, juga dari segi sosial jaringan interaksi dan hubungan emosional dapat terjalin sebagai bentuk penyebaran silaturahmi antar sesama, serta dengan keberadaan wisata budaya Sade ini sebagai ajang untuk menambah wawasan pengetahuan pengalaman dari berbagai budaya-budaya yang hidup di luar wilayah Sade, baik itu dari segi bahasa, tata cara berkomunikasi dan juga berperilaku. Sehingga secara simple kesejahteraan sosial masyarakat Dusun Sade tergolong sebagai masyarakat yang sejahtera berdasarkan pengertian dan pemahaman atas multi akses pencapaian kesejahteraan yang mencakup material, spiritual dan sosial sebagai awal pengembangan diri, perbaikan taraf hidup sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya .

Daftar Pustaka

- M. Liga Suryadana & Vanny Octavia. (2015). *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung; Alfabeta
- Elly M. Setiadi. Dkk. (2008). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- JaniantonDamanik. (2013). *Pariwisata Indonesia Antara Peluang & Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Miftachul Huda. (2009). *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*.
Bandung: Pustaka Pelajar

Syaikh Muhammad bin Shâlih al-'Utsaimîn, *Betapa Penting Menyambung Silaturahmi*, <https://almanhaj.or.id/2658-betapa-penting-menyam-bung-silaturahmi.html>.

Tunggul Prasodjo. *Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Vol, 3, No, 1, 2017, hlm. 9 <https://ojs.un-m.ac.id/jo/article/view/3448>.

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

PETUNJUK PENULISAN

Komunitas menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 12 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada [linkhttp://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas](http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas).
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
 - Spencer Crump, *FundamentalofJurnalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
 - Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
 - Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami` al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**

Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinullslam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyaha, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
 - Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan CivilSociety di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

- D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

- g. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurutan, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.
- h. Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.
- i. Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

- **Buku:** Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- **Jurnal:** Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.
- **Media Massa:** Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.
- **Makalah:** Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.